

BAB IV

BEBERAPA BIDANG PERANSERTA NU DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL (1984-1989)

Sesuai dengan Program Dasar Pengembangan NU, yang dijabarkan kedalam Garis Besar Kebijakan Operasional PBNU tahun 1984-1989, peranserta NU dalam pembangunan Nasional periode 1984-1989 mencakup tigabelas bidang yakni: syuriah, na'arif, da'wah dan penerbitan, sosial/mabarot, perekonomian, pertanian dan nelayan, tenaga kerja, kebudayaan, kewanitaan, kepemudaan, kaderisasi, organisasi, dan pembentukan kepribadian.

Disamping itu, masih ada beberapa bidang lainnya yang tidak dicantumkan dalam Program Dasar Pengembangan NU, misalnya bidang Pertahanan Keamanan bagian Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata), bidang politik walaupun NU sudah tidak menomor satukan politik, bidang pembangunan daerah, dan lain-lainnya.

Oleh karena itu uraian tentang bidang-bidang peranserta NU dalam pembangunan nasional berikut ini, menggunakan urutan sesuai dengan GBHN yang telah ditetapkan MPR RI di Jakarta, pada tanggal 9 Maret 1983.

Urutan-urutan bidang tersebut yakni: ekonomi; agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosial budaya; politik, aparatur pemerintah, hukum, penerangan dan media massa, hubungan luar negeri; dan pertahanan keamanan.

A. Ekonomi

Peranserta NU dalam pembangunan bidang ekonomi mencakup beberapa sub bidang antara lain: pengembangan dunia usaha, tenaga kerja, industri, pembangunan daerah, pertanian, sumber alam dan lingkungan hidup, perdagangan, pertanian, sumber alam dan lingkungan hidup, perdagangan koperasi, transmigrasi, pariwisata, perhubungan, energi dan pertambangan.

1. Pengembangan Dunia Usaha

Dalam rangka mengembangkan dunia usaha, NU telah membentuk perseroan yakni PT Karya Insan Mandiri Sejati yang dipendekkan menjadi PT Karya Inmas.

PT tersebut didirikan dan mendapat pengesahan Notaris di Jakarta, yakni Abdul Latief, pada hari Rabu 15 Mei 1985. PT ini berkedudukan di Jakarta, dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah:

- a. Berdagang pada umumnya, termasuk impor ekspor dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain.
- b. Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri kecuali keagenan perusahaan perjalanan.
- c. Menjalankan usaha-usaha sebagai leveransir, grosir, dan distributor.
- d. Mengusahakan berbagai macam industri.
- e. Memborong, merencanakan, dan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan, termasuk jalan-jalan, jembatan-jembatan, pengairan, pengurukan, penggalian dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bersangkutan dengan itu.
- f. Mengusahakan perusahaan pengangkutan darat, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.¹⁰³

Modal dasar perseroan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), terbagi atas 1000 saham, masing-masing seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Dan saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar PT tersebut.¹⁰⁴

Saham-saham tersebut sebagian dimiliki oleh NU, dan saham sisanya dimiliki oleh pribadi-pribadi yang ditunjuk oleh PBNU dan yang duduk dalam kepengurusan PBNU.¹⁰⁵

Sedangkan yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas suatu saham hanyalah: seorang warga negara Indonesia, atau suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia -didirikan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia

dan para anggotanya atau para pemegang sahamnya dan para anggota pengurusnya adalah warga negara Indonesia.¹⁹⁶

Mengenai neraca dan perhitungan laba-rugi perseroan berjalan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember, dan yang mengesahkan perhitungan laba-rugi adalah rapat umum para pemegang saham.¹⁹⁷

Keuntungan bersih tiap-tiap tahun, seperti yang tersebut dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum tahunan para pemegang saham. Dan deviden-deviden yang tidak diambil dalam lima tahun setelah disediakan untuk dibayar, jatuh pada perusahaan.¹⁹⁸

Perseroan ini dimulai sejak anggaran dasarnya disetujui dan disahkan oleh yang berwajib yakni tanggal 15 Mei 1985, dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan dan berlaku untuk tujuh puluh lima tahun lamanya.¹⁹⁹

Perpanjangan waktu atau pembubaran sebelum waktu yang telah ditentukan, merubah nama, merubah tempat kedudukan atau tujuan perseroan, dan atau merubah ketetapan-ketetapan dalam anggaran dasar perseroan, hanya dapat terjadi dengan keputusan dari rapat umum luar biasa para pemegang saham yang sengaja diundang untuk keperluan tersebut. Dalam rapat tersebut harus dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan, dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.²⁰⁰

Adapun mengenai segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur didalam anggaran dasar perseroan, akan diputuskan oleh rapat umum para pemegang saham.²⁰¹

Pengurus atau pemegang jabatan dalam perseroan ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Ir. Salahuddin Wahid.
Direktur-direktur	: Moch. Yanis Zahiruddin. Drs. Sutanto Martoprasono.
Komisaris Utama	: Hamid Baidlowi.
Komisaris-komisaris	: Rahmat Mulyomiseno. Syaiful Maskur.

Said Budairi.
H. Muhammad Munasir.²⁰²

Syaiful Maskur dan Said Budairi adalah dua orang yang ditugaskan PBNU untuk mewakili dan atas nama PBNU duduk dalam kepengurusan PT Karya Inmas, dalam rangka menggali sumber dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan organisasi dengan pengarahannya PBNU.²⁰³

Untuk mengembangkan dunia usaha ini, NU memiliki Badan Otonom yang bergerak dibidang tersebut, yakni Himpunan Pengusaha Muslimin Indonesia (HPMI). Namun, HPMI itu hingga pertengahan tahun 1985 gerakannya masih tersendat-sendat dan masih memerlukan dorongan, motivasi, serta penataan kembali.²⁰⁴

Walaupun demikian, warga NU -tanpa wadah yang diprakarsai NU- tetap bergerak di dunia usaha diberbagai tingkatan yakni usaha besar, menengah, dan kecil. Dalam usaha besar ini, misalnya pengusaha yang berasal dari kota Surabaya yaitu H. Sukri yang bergerak di bidang besi tua. Walaupun dia sudah meninggal dunia, namun usahanya dilanjutkan oleh putranya hingga kini.

Masih banyak lagi sektor-sektor dunia usaha yang ditangani oleh warga NU yang tidak mungkin disebutkan semuanya disini. Dan sebagai kasus, berikut ini akan dijabarkan dua pengusaha NU yang bergerak dibidang produksi pakaian jadi dan perdagangan besi tua.

a. Produksi pakaian jadi.

Ketua NU cabang Tulungagung H. Moch. Hamim Badaruzzaman, 45 tahun, telah mendirikan sebuah CV yang bernama Vascho.²⁰⁵

CV Vascho didirikan pada tahun 1989, dan kegiatannya dipusatkan di Jln. A. Yani Barat 1/5 Tulungagung.²⁰⁶

Pada mulanya Vascho hanya memproduksi kerudung, lantas berkembang memproduksi celana, pakaian training, kaos, kemeja, alas tempat tidur/sprei, dan lain-lain.²⁰⁷

Omzet CV tersebut sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan kapasitas produksi 200

potong per hari. Dan jumlah karyawannya 60 orang.²⁰⁸

Daerah pemasaran produksi meliputi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Sumatera.²⁰⁹

Mengenai pemasaran, Hamim menandakan, "wah ... kalau bicara soal persaingan, memang rumit. Karena itu, saya tak memakai konsep promosi seperti umumnya dunia bisnis. Saya sangat menyimpang dari teori promosi pasar," ia meneruskan "Kadang-kadang pegawai Vascho mempromosikan produksinya dengan cara berkeliling. Menawarkannya di sembarang tempat dengan menggunakan megaphone, tapi Alhamdulillah, hasilnya juga lumayan".²¹⁰

Untuk mengurus CV tersebut ia telah menunjuk dua orang asisten, "Saya tinggal ngontrol saja," katanya. Karena itu, ia masih punya waktu untuk sibuk di kantor Cabang NU.²¹¹

Di daerahnya Hamim, banyak didapati pengusaha yang serupa, kira-kira 600 pengusaha. Dan anehnya, semua warga NU.²¹²

Salah seorang dari mereka, H. Shodiq, pernah memperoleh penghargaan "Upakarti" dari Presiden Soeharto.²¹³

b Perdagangan besi tua

Pengurus Lembaga Ekonomi NU Wilayah Jawa Timur, H. Nilam, telah terpilih dua kali menjadi ketua Asosiasi Pedagang Logam Tua Indonesia (Apelti). Pemilihan yang kedua itu, dilangsungkan di hotel Elmi Surabaya.²¹⁴

Apelti adalah sebuah wadah tempat berkumpulnya para pedagang besi tua di Jawa Timur. Pada mulanya, di Jawa Timur hanya terbentuk 23 cabang. Namun dalam perkembangannya, nampaknya telah mencapai sukses yang gemilang. Kini, Apelti telah dibentuk di tingkat Nasional, dan berhasil didirikan di 10 daerah priprinsi.²¹⁵

H. Nilam, sebagai pimpinan Apelti, memusatkan usaha dagangnya di Jln. Danakarya, Surabaya. Dari Jln. Danakarya ini, ia melangkah ke kabupaten Lamongan mendirikan Supermarket. Disamping itu, ia juga mendirikan PT dengan na-

manya sendiri yang bergerak di bidang Real Estate.²¹⁶

H. Nilam, putra asal Kedungdung Bangkalan dengan 5 putra ini, merintis karir usahanya dari bawah. Pada mulanya, ia seorang penjual jasa "jual beli sepeda" di Jln. Raden Saleh. Bahkan ia pernah menjadi penyalur beras ke Dolog di zaman beras mahal karena produksi beras merosot tajam.²¹⁷

Dibidang organisasi, ia juga merintis dari bawah. Ia mulai karir organisasinya lewat IPNU Semampir, kemudian menjadi Bendahara Anak Cabang GP Ansor Semampir Surabaya Utara dan kini ia duduk di pengurus wilayah NU Jawa Timur memimpin Lembaga Ekonomi.²¹⁸

Sukses dibidang bisnis dan organisasi, H. Nilam hanya bermodalkan prinsip: "kemauan yang tak mudah patah, dan kegagalan adalah pengalaman yang berharga".²¹⁹

Nampaknya, dalam dirinya telah berjangkit virus mental yakni need for achievement.

2. Tenaga Kerja

Dalam rangka pembinaan tenaga kerja dan sumberdaya manusia, NU telah membentuk Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) pada 8 April 1985.²²⁰

Proses kerja lembaga ini, tergambar dalam diagram 7.

Disamping itu untuk meningkatkan kualitas pengurus organisasi, NU memiliki Sistem Pendidikan dan Latihan Ketenagaan (SPLK) yang dikelola Lakpesdam.

SPLK ini mempunyai dua sisi kepentingan yang dikembangkan secara simultan, yakni: menghasilkan tenaga-tenaga dengan berbagai ragam katagori kemampuan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas institusional NU, dan menghasilkan tenaga-tenaga yang berkemampuan sebagai perencana, penggerak, dan pengelola program-program pembangunan terutama pada tingkat pelaksanaan di lapangan.²²¹

Sedangkan proses pelaksanaan SPLK adalah sebagai berikut: penataran dan penyuluhan, kursus perencanaan dan pengelolaan program, latihan kepemimpinan-I, latihan kepemimpinan-II, kursus perencanaan dan penyelenggaraan program latihan, dan pendidikan/latihan lanjutan.²²²

Baik Lakpesdam atau SPLK sebagai sub unit Lakpesdam, kini sedang giat-giatnya dilaksanakan di hampir setiap jajaran NU di Indonesia.

Di Jawa Timur, PWNU telah melaksanakan kerja sama dengan Lakpesdam dalam rangka penyelenggaraan latihan kepemimpinan NU.

Latihan itu dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 12 s/d 17 Nopember 1985. Kemudian diperluas ke beberapa Cabang dan MWC di seluruh Jawa Timur, yang dipusatkan di tiga rayon yakni: Surabaya, Kediri, dan Kraksaan.²²³

3. Industri

Peranserta NU didalam pembangunan Industri tidaklah menyeluruh, namun bersifat partial.

Secara organisatoris, NU tidak memiliki Lajnah, Lembaga atau Badan yang khusus bergerak di bidang Industri, namun warga NU secara orang per orang ikut terlibat didalam kegiatan industri tersebut. Dan umumnya, masih tergolong industri kecil misalnya: industri pengolahan kayu untuk pembuatan alat-alat rumah tangga seperti meja, kursi, tempat tidur dan lain-lain; industri pengolahan besi untuk

pembuatan pagar rumah, tempat piring di dapur, dan lain-lain; industri pengolahan tanah untuk pembuatan batu bata, genteng, alat-alat keramik, dan lain-lain; industri pembuatan kapur untuk bahan bangunan; dan lain-lain.

Berikut ini adalah sebuah kasus tentang pembuatan teropong bintang oleh warga NU di kabupaten Jember.

Kiyai Muzammil Hasan Basri, 27 tahun, telah menemukan dan berhasil membuat teleskop angkasa luar (peneropong bintang).²²⁴

Dia seorang aktivis NU ditingkat Ranting, tinggal di desa Kemiri kecamatan Panti, Jember. Di desanya, ia menjadi pengasuh pesantren yang ada di sana. Tatkala mempelajari Tafsir Al-Qur'an, ia tertarik dengan sebuah ayat Al-Qur'an. Baginya, ayat itu sangat berkesan, sehingga kemudian dilukis diatas pigora kaca dan dipajang di ruang tamu.²²⁵

Ayat tersebut yakni:

"اعن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايت
لاولى الا لىاب"

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal."²²⁶

Setelah memikirkan kandungan ayat tersebut, pada tahun 1980 ia mulai mengembangkan studynya. Muzammil menghubungi lembaga penelitian bintang di Lembang Bandung dan gagasannya disambut baik. Pada 1983, ia juga mengunjungi bagian Planetarium di Jakarta, dan disana dia memperoleh petunjuk-petunjuk yang berharga.²²⁷

Pada tahun 1985, ia mulai merancang teleskopnya. Bahan pokok teleskop itu terdiri dari teropong pipa plastik (paralon). Dalamnya dibalut dengan filter dari lapisan karbon hitam pekat, dan dilengkapi dengan kaca lensa yang berlapis-lapis. Tutup lensa atas terbuat dari botol bekas minyak rambut yang berukuran besar dan berwarna hitam, lantas digergaji sedemikian rupa, ujungnya diberi penutup kertas, dan bisa dicopot langsung.²²⁸

Teleskop itu dirancang menjadi dua bagian. Bagian bawah dipergunakan untuk mengintai bintang dan planet-planet lain di waktu malam antara lain: Saturnus, Uranus, yupiter, Mars, Venus, dan bintang ganda, sehingga nampak jelas sekali kawah, gunung, serta gelang-gelang yang mengitarinya.²²⁹

Muzammil yang autodidak itu, merekam hasil observasinya dalam gambar, foto-foto, dan skema dari planet-planet di angkasa luar.²³⁰

Sampai kini, tentunya dia masih sibuk mengembangkan hasil temuannya itu.

4. Pembangunan Daerah

Dalam pembangunan daerah, perhatian yang lebih besar ditujukan pada daerah-daerah yang relatif terbelakang, daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah yang padat penduduk, dan daerah-daerah kepulauan terpencil.

Warga NU pada hakekatnya sangat membutuhkan pelaksanaan pembangunan daerah, sebab sebagian besar warga NU tinggal di daerah-daerah, atau bahkan di daerah pulau-pulau terpencil seperti pulau Bawean.

Namun, secara resmi NU tidak memiliki lembaga atau badan yang khusus menangani masalah tersebut. Karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan daerah, NU mengikuti program-program yang dilaksanakan pemerintah.

Akan tetapi, kadangkala warga NU ada juga yang menjadi pelopor pembangunan daerah di desanya. Berikut ini, kepeloporan warga NU di sebuah desa di pulau Bawean, yang letaknya terpencil sekitar 75 mil sebelah utara pulau Jawa.

Ketua bagian mabarot NU Cabang Bawean, H. Ridlwan, 42 tahun, telah berkarya membuat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang mampu menerangi 600 rumah, masjid, madrasah, dan jalan-jalan di dukuh Menara yang terletak di kawasan pegunungan Teguh, 3 km sebelah utara kota Sangkapura, Bawean.²³¹

H. Ridlwan, ayah dari 6 anak itu, telah memikirkan PLTA tersebut sejak 6 tahun sebelumnya dan telah menghabiskan biaya lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta

rupiah).²³²

Pembuatan PLTA itu, dimulai dari membangun sebuah kolam berukuran 25 X 15 m untuk penampungan air terjun yang tingginya kira-kira satu meter, dan dialirkan melalui parit sepanjang 700 m. Dari kolam itu, air diterjunkan lagi lewat pipa setebal 25 cm, menerpa baling-baling turbin 23 m dibawahnya. Turbin berputar menggerakkan generator yang memproduksi pijar listrik. Dari generator dikirim ke gardu pengaman. Disitu ada panel yang berfungsi sebagai alat pengaman dan pembagi strom.²³³

Untuk perawatan PLTA, dia mengangkat seorang karyawan anaknya sendiri, A. Fauzan tamatan STM Petro Gresik jurusan listrik. Bila permintaan listrik meningkat, ia siap memperluas jaringan PLTA itu di tempat-tempat yang memungkinkan.²³⁴

H. Ridlwan, dikenal telaten dan ulet, suka bekerja keras hingga cita-citanya berhasil. Disamping PLTA, ia juga memimpin proyek pembangunan masjid dan juga telah membuat rencana pembangunan pesantren. Bahan-bahan bangunan seperti tegel, genteng, batu bata, dan lain-lainnya, diproduksi sendiri. Ia mengirinkan beberapa tenaga ke Jawa untuk dikursuskan. Lantas membeli alat-alat yang diperlukan, dan mengambil tenaga kerja dari masyarakat di desanya.²³⁵

Karena prestasinya itu, Muspika kecamatan Sangkapura berkenan mengunjungi desanya untuk meninjau lokasi PLTA dan proyek-proyek lainnya. Dalam kunjungannya tersebut, pihak Muspika menawarkan bantuan bila diperlukan. Namun H. Ridlwan memandang masih belum perlu; mungkin untuk proyek-proyek lainnya di hari depan bantuan tersebut diperlukan.²³⁶

5. Pertanian

Warga NU sebagian besar tinggal di desa-desa bercocok tanam. Karena itu, NU membentuk Lembaga Pengembangan dan Pembangunan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP3 NU). Pada tanggal 14 Mare 1985, lembaga ini melakukan reformasi.

Namun lembaga tersebut nampaknya kurang efektif,

sehingga sebagian besar petani NU tidak merasakan manfaatnya.

Dalam pembangunan pertanian, sebagian besar warga NU mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dari Pemerintah c.q. Departemen Pertanian.

Hal ini bisa dilihat pada suntingan sebuah kasus yang terjadi di kabupaten Sidoarjo Jawa Timur: Sekretaris Muslimat NU Cabang Sidoarjo, H. Fatmah Assegaf, adalah seorang direktur pabrik tegel yang mengerjakan 26 karyawan. Kapasitas produksinya mencapai 250 m² per hari, atau sekitar tiga juta rupiah perputaran modal per hari.²³⁷

Disamping sebagai pengusaha tegel, Fatmah yang lahir tahun 1948 dan ibu empat anak itu, menginginkan meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan dengan jalan merintis pola hidup yang produktif.²³⁸

Upaya untuk merealisasikan hal itu, ia bekerja sama dengan Departemen Pertanian dan Dinas Perkebunan Jawa Timur, untuk pengadaan bibit kelapa "Hibrida" sekaligus teknis penanaman dan perawatannya. Hasilnya, yakni bibit kelapa, disalurkan ke masyarakat pedesaan yang umumnya warga NU.²³⁹

Kegiatan itu, tentu saja dipusatkan di Jln. Elbra 4F, Sekardangan Sidoarjo; sebab ia tinggal disana bersama suaminya H. Abdullah Assegaf.²⁴⁰

Sampai kini, disamping menjabat sebagai sekretaris Muslimat, ia juga sebagai pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKK NU) wilayah Jawa Timur.²⁴¹

6. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam pembangunan sumber alam dan lingkungan hidup, NU tidak memiliki Lembaga atau Badan yang khusus menangani hal tersebut. Karena itu, sebagian besar warga NU mengekor saja terhadap program-program yang direalisasikan pihak pemerintah.

Tanpa menunggu komando PBNU, warga NU di beberapa tempat mampu mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan

indah, dan juga melaksanakan pemeliharaan sumber alam. Dibawah ini, dua kasus yang terjadi di kabupaten Kediri dan pulau Bawean.

Di kabupaten Kediri, tepatnya di desa Ploso, ada sebuah pesantren "Alfalah" namanya, dan dipimpin oleh K.H. Zainuddin Djazuli yang mengasuh 1500 santri putra dan putri.²⁴²

Zainuddin, kontraktor CV "Kiyai Mojo" itu, telah berhasil membangun gedung asrama santri yang memenuhi syarat-syarat lingkungan hidup sehat dan indah, seharga tiga ratus juta rupiah.²⁴³

Bangunan itu nampak bersih mirip sebuah hotel. Konon menurut Zainuddin, inspirasinya memang diperoleh dari sebuah hotel di Jakarta. Ketika bermalam di sana, gambar hotel diambil karena ia sendiri seorang arsitek walau bukan lulusan perguruan tinggi teknik arsitektur. Kemudian diajak beberapa tukang dan santri untuk mewujudkan gagasannya. Setelah jadi, bangunan itu diberi nama "Al falah II".²⁴⁴

Bangunan itu berlantai dua, terletak diatas areal 2800 m², mempunyai 48 kamar. Di halaman depan, terdapat hiasan taman-taman bunga dan rumput-rumput kerdil tapi lebat yang dipisahkan dengan kerikil putih berkualitas tinggi. Di halaman dalam juga terdapat hiasan yang sama, dan masing-masing taman dipisahkan dengan jalan setapak menuju pintu kamar asrama yang bergaris tepi seperti trotoar Tunjungan Plaza. Setelah masuk pintu utama, terlihat tulisan "AULA" yang terpampang di lantai 2 yang menunjukkan bahwa disana ada ruang pertemuan.²⁴⁵

Di pulau Bawean, yang mayoritas penduduknya warga NU itu, muncullah seorang pemenang lomba lingkungan hidup tingkat nasional 1986 dan meraih penghargaan "Kalpataru", untuk katagori pengabdian lingkungan.²⁴⁶

Pemenang tersebut bernama Hatib Zen, warga kecamatan Sangkapura, anggota kelompok tani desa Pusdiklat Barat, yang sejak 1977 bekerja sebagai tenaga honorer pada resort Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA).²⁴⁷

Berkat keuletannya dalam ikut melestarikan flora dan

fauna, Hatib berhasil membangkitkan kesadaran penduduk yang tinggal di lereng-lereng gunung, sehingga rusa jenis "Axis Kuhli" satwa langka yang hampir punah itu dapat diselamatkan, karena penduduk kembali menyayangi satwa langka tersebut dan meninggalkan kebiasaan berburu.²⁴⁸

Pada tahun 1977 menurut World Wildlife Fund dalam Data Red Book, rusa jenis "Axis Kuhli" yang tak mungkin dijumpai di tempat lain di bumi ini kecuali hanya di Bawean, tercatat tinggal hanya 300 ekor. Kini setelah pelaksanaan usaha pelestarian, rusa yang tinggal di suaka alam berupa hutan perawan, hutan jati, padang rumput dan belukar, yang arealnya seluas 4500 hektar itu, berkembang biak sampai sekitar 1200 ekor.²⁴⁹

Menurut Hatip, "dulu kakek saya bilang bahwa sinar Bawean ada pada rusa itu," demikian ia manirukan nasehat kakeknya, "jangan sampai punah". Lantas dia menegaskan, "buktinya, saya memperoleh penghargaan Kalpataru".²⁵⁰

Disamping itu, pulau Bawean kaya dengan obyek-obyek wisata yang menarik namun belum dibuka seperti: panandian air panas di Sangkapura, pantai Terosan di gunung Selayar, pantai Muara dan Tanjung Anyar di Lebak, pantai Mayangkara di timur Diponggo, danau Kastoba, pulau Gili, dan puluhan gunung yang menjulang hijau.²⁵¹

7. Perdagangan

Partisipasi NU dalam dunia dagang dapat dikatakan luas, namun secara formal tidak terkoordinir secara rapi, sebab solidaritas dagang warga NU tidak begitu kuat.

NU memiliki Himpunan Pengusaha Muslimin Indonesia (HPPI), namun tidak mempunyai Kamar Dagang, sehingga arus produksi dari produsen ke konsumen seringkali tersendat-sendat atau tidak lancar. Akibatnya, produksi menumpuk sulit menjangkau pasar dan siklus modalpun menjadi lambat. Namun, bagi pengusaha yang sudah ahli dan terampil di bidang pemasaran, keadaan tersebut bukan lagi menjadi hambatan.

Pedagang-pedagang NU sebagian besar tergolong kelas

menengah ke bawah, dan masih sedikit yang bisa dibilang besar. Tapi, karena banyaknya warga NU yang bergerak di bidang dagang, maka penanganannya terasa sangat penting.

Pedagang-pedagang NU yang tergolong lemah tentunya menyambut gembira atas usaha-usaha pemerintah, terutama kebijaksanaan pemerintah disektor perkreditan yang terkenal dengan sebutan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) yang dilaksanakan sejak tahun 1974, bertujuan membantu pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah dalam bidang permodalan.

Pedagang golongan ekonomi lemah banyak didapati di pasar-pasar, di tepian-tepian jalan yang strategis atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan.

Sedangkan pedagang golongan ekonomi menengah biasanya sudah mempunyai lokasi yang memadai atau kantor sebagai sarana memutar roda perdagangan dimaksud. Berikut ini sebuah kasus yang terjadi di Lamongan yaitu seorang kiyai sekaligus pedagang.

Aktivis NU, K.H. Subakir, adalah penangku pesantren "Kranji" yang telah mencapai sukses dalam bidang dagang kayu jati, sehingga dengan uangnya sendiri ia dapat membangun memperbaiki gedung-gedung pesantren yang diperlukan.

Pesantren itu didirikan oleh mertuanya K.H. Sholeh, terletak di desa Kranji kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Dan saat ini sudah memiliki lembaga pendidikan tingkat TK, Madrasah, Tsanawiyah, Aliyah, dan kabarnya sudah mempunyai Perguruan Tinggi.

Dalam dunia dagang kayu jati, Subakir yang pernah belajar di pesantren "Tambak Beras" itu, benar-benar merintis dari bawah. Pada mulanya, ia mengecer kayu irisan bahan bangunan seperti reng, usuk, dan lain-lain di taruh di sampingnya rumahnya.

Semakin hari semakin berkembang, akhirnya mampu melayani pembikinan perahu yang tergolong besar yang harus memakai kayu jati kelas satu. Disamping itu, ia sering memenangkan lelang kayu jati yang dilaksanakan pemerintah, di hutan Bojonegoro, atau di tempat-tempat lain.

Tentang kiyai yang juga pedagang ini, penulis pernah mengamati langsung selama beberapa bulan sambil menjadi guru di pesantrennya pada 1984. *Kerjakan !*,²⁵² kiyai itu berteriak tegas, ketika menjadi inspektur upacara, di halaman depan gedung sekolahan.

8. *Kooperasi dan Lain-Lain*

Dalam pembinaan koperasi, NU membuat proyek percontohan di suatu daerah, yang diharapkan dapat diikuti oleh daerah-daerah lain yang memerlukan koperasi.

Proyek ini dikerjakan oleh PBNU, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang secara serempak. Dimulai dari penelitian, study kelayakan, usulan proyek, dan pengorganisasian proyek secara keseluruhan.²⁵³

Proyek percontohan tersebut yakni koperasi perikanan darat, dilaksanakan di kota Purwarejo untuk pulau Jawa, dan di kota Jambi untuk pulau Sumatera.²⁵⁴ Untuk daerah lain, tentunya dapat mengikuti proyek percontohan dimaksud.

Begitu juga untuk bidang transmigrasi, yang pelaksanaannya memerlukan pemikiran dan perencanaan lebih teliti dan hati-hati, terutama mengenai daerah yang dituju transmigran. Nampaknya NU memilih daerah Sulawesi.

Proyek percontohan transmigrasi swakarsa ke daerah Sulawesi, sementara diberangkatkan 20 kepala keluarga (KK) berasal dari berbagai cabang NU di pulau Jawa.²⁵⁵

Adapun partisipasi NU dalam pembangunan pariwisata, perhubungan, energi, dan pertambangan, masih berada di tahap mengamati dan mempelajari, atau penulis sendiri yang belum mendapatkan fakta-faktanya.

Namun dibidang perhubungan dalam skala kecil, tentunya banyak didapati warga NU yang telah aktif di bidang jasa transportasi. Seperti sebuah kasus, menurut pengamatan penulis sendiri, pengasuh pesantren "Al-Ikhsan" telah merintis dan bergerak dibidang transportasi taksi dalam skala kecil. Pesantren ini terletak di desa Brangkal, kecamatan Sooko, kabupaten Mojokerto. Nama pengasuhnya

K.H. Khusen Ikhsan yang juga pengelola panti asuhan.

Di Jember, kabarnya ada seorang warga NU yang bergerak dibidang transportasi bus antar kota yang tergolong besar.

B. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya

Peranserta NU di bidang ini, meliputi beberapa sub bidang yakni: agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan, ilmu pengetahuan/teknologi dan penelitian, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, kesejahteraan sosial, generasi muda, dan peranan wanita dalam pembangunan bangsa.

1. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Dalam pembangunan agama, peranserta NU sangat besar sekali sehingga tidak mungkin ditulis semuanya disini. Berikut ini, hanya sebagian kecil saja yang mampu dirumuskan dan dikisahkan oleh penulis. Peranserta itu meliputi antara lain: penerimaan asas tunggal Pancasila, tajdid, penetapan hukum (figh) terhadap hal-hal yang baru, dan pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

a. Penerimaan Asas Tunggal Pancasila

Sejak tahun 1984, NU telah menetapkan memakai asas tunggal yakni Pancasila.²⁵⁵

Penerimaan asas tunggal Pancasila ini, bermula dari keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Situbondo tahun 1983, yang kemudian dikukuhkan dan disahkan menjadi keputusan Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo juga.

Menurut keputusan Munas Alim Ulama NU, Nomor: II/HAUNU/1404/1983, menetapkan bahwa:

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara RI bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara RI

menurut pasal 29 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, yang menjiwai Sila-Sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

3. Bagi NU, Islam adalah agidah dan syariat, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.

4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.

5. Sebagai konsekwensi dari sikap diatas, NU berkewajiban menganankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua pihak.

Selanjutnya ditegaskan juga dalam keputusan tersebut yakni:

Bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan warga NU adalah bagian mutlak dari kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka dalam perjuangan mencapai masyarakat adil dan makmur yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat Indonesia, dengan rahmat Allah s.w.t. organisasi NU berasaskan:

- Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Kenusiaan yang adil dan beradab.
- Persatuan Indonesia.
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa ketuhanan Yang Maha Esa bagi umat Islam merupakan kepercayaan terhadap Allah Yang Maha Esa sebagai inti agidah Islam yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah.

Akhirnya, keputusan itu memberikan penjelasan mengenai hubungan NU dan Pancasila, yakni:

Mengenai Pancasila, NU berpendapat bahwa sesungguhnya rumusan nilai-nilai yang dijadikan dasar negara RI sudah tuntas dengan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Semua pihak harus hanya memahami (memiliki persepsi tentang) dasar negara menurut bunyi dan maknanya yang terkandung dalam UUD 1945 (pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya) itu.

Kaum muslimin Indonesia bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia juga memikul kewajiban memenuhi kesepakatan bersama itu.

Kaum muslimin Indonesia (termasuk kaum Nahdliyin) menerima dasar negara RI itu, berdasar prinsip; bahwa kaum muslimin Indonesia, melalui para pemimpinnya, ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar

negara itu, serta karena nilai-nilai yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dibenarkan, menurut pandangan Islam.

Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan Islam, karena itu jangan dipertentangkan.

NU yang berhaluan pada aqidah dan syari'ah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang sejak semula menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (billa'fdhi wal ma'nal murad), dengan rasa tanggung jawab dan tawakkal kepada Allah serta mengharap ridla-Nya, berketetapan menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi.

NU sebagai Jam'iyah diniyah Islamiah beraqidah Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan mengikuti salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Dalam muqoddimah Anggaran Dasar NU tahun 1984-1989 ditegaskan kembali:

Bahwa kemaslahatan dan kesejahteraan warga NU adalah bagian mutlak dari kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka dalam perjuangan mencapai masyarakat adil makmur yang menjadi cita-cita seluruh masyarakat Indonesia, dengan rahmat Allah s.w.t., organisasi NU berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa bagi umat Islam merupakan kepercayaan terhadap Allah s.w.t. sebagai inti aqidah Islam yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah s.w.t.

Dengan demikian, menjadi jelaslah hubungan antara Islam dan Pancasila, dan semakin mudahlah bagi umat Islam Indonesia khususnya warga NU bagaimana seharusnya menjalankan agamanya, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara di tanah air Indonesia.

b. Tajdid

Masalah tajdid secara resmi mulai dibicarakan oleh NU sejak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) di pesantren Ihya Ulumuddin, Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah.

Munas dan Konbes yang masing-masing berlangsung dua hari, sejak 14-18 Nopember 1987, belum berhasil memformulasikan pengertian tajdid karena sempitnya waktu, sehingga Munas mengamanatkan pada PBNU untuk merampungkan persoalan tersebut.

Meskipun persoalan tajdid belum rampung, namun Munas Ulama NU itu dapat menerima patokan tajdid yang disuarakan K.H. Ahmad Siddiq yakni: "Tajdid bukan mengganti unsur-unsur Islam dengan sesuatu yang baru, tetapi memulihkan Islam menjadi bersih kembali seperti semula serta menggalakkan kembali amalan-amalan yang terbengkalai pelaksanaannya."²⁶⁰

Istila tajdid (تجدید) berasal dari kata jaddada (جدد), yujaddidu (يجدد), tajdiidan (تجديدًا) yang artinya membuat sesuatu baru lagi. Sedangkan mujaddidd (مجدد) berarti pelaku tajdid.²⁶¹

Sedangkan fungsi tajdid adalah:

1. Al-i'aadah (الإعادة), artinya pemulihan ajaran Islam. Dipisahkan/dibersihkan dari campuran unsur-unsur yang merugikan dan mengganggu kemurnian dan kesempurnaan Islam.
2. Al-ibaanaah (الإبانه), artinya membedakan yang sunnah dari yang bid'ah, secara cermat oleh para ahlinya.
3. Al-ihyaa' (الإحياء), artinya menghidupkan kembali bagian-bagian dari ajaran Islam yang pengamalannya terbengkalai atau terhenti.²⁶²

Selanjutnya Ahmad Siddiq menguraikan bahwa dengan fungsi tersebut, tajdid akan berhasil menjadikan agama Islam selalu kembali bersih, jernih dan lurus; setiap kali terjadi kekeruhan dan pencemaran. Dengan kembali pada fitrahnya yang jernih, Islam dapat diterapkan menghadapi perkembangan zaman yang selalu berubah.²⁶³

Sedangkan syarat-syarat mujaddid meliputi:

1. Penguasaan yang luas dan mendalam terhadap ajaran agama Islam, mulai dari hikmah tasyri', falsafah tayri' sampai ulumul Qur'an, ulumul Hadits, ulumul ahkam, dan sebagainya.
2. Ghiroh yang tinggi dan luhur untuk membela, mempertahankan dan mengembangkan agama Islam serta pengamalannya.

secara benar.

3. Sikap mental (akhlak) yang luhur, berwujud kejujuran, kesungguhan, kecermatan, dan sebagainya.²⁶⁴

Penelusuran masalah tajdid ini, menurut beliau, agar pengertian tentang tajdid itu tidak semrawut/kabur dan untuk mencegah pelaksanaan tajdid yang salah. Beliau menandakan: "Islam adalah agama dari Allah, tak boleh diubah-ubah. Islam sudah sempurna sejak semula".²⁶⁵

Pendapatnya itu mendapat pujian dari A.R. Fakhruddin, ketua PP Muhammadiyah; dan kiyai Hasa Basri, ketua umum MUI. "Itu tepat sekali dan benar belaka", kata mereka.²⁶⁶

Disamping itu, ia juga mengatakan bahwa sistem bermadzhab merupakan salah satu hasil tajdid yang gemilang. Imam-imam madzhab mu'tabar adalah mujaddid-mujaddid besar yang bukan saja memberikan pedoman pada kaum muslimin yang awan, tapi juga pada mujaddid di zaman-zaman berikutnya.²⁶⁷

Pada hakekatnya, peranan NU dan beberapa organisasi Islam Ahlussunnah wal Jama'ah adalah bagian dari gerakan tajdid dalam pengertian yang luas. Dalam melaksanakan fungsi sebagai bagian dari gerakan tajdid, NU selalu setia pada sistem bermadzhab yang kaya dengan metodologi ijtihad/istimbath. Dan dalam sistem bermadzhab itu, dapat terpadu pemeliharaan terhadap yang lama yang baik dan pengambilan terhadap yang baru yang lebih baik.²⁶⁸

c. Penetapan hukum (figh) terhadap hal-hal yang baru

Dalam Munas Alim Ulama, yang berlangsung pada 18-21 Desember 1983, di Pesantren Salafiyah Syafiiyah-Sukorejo-Situbondo-Jawa Timur, para Ulama telah bersepakat berdasarkan dalil-dalil syari'iyah terhadap beberapa masalah yang memerlukan penetapan hukum (figh).

Beberapa masalah itu meliputi: penetapan awal Ramadhan dan Syawal, kitab-kitab yang mu'tabar, pemotongan hewan, penjualan kulit udhiyah oleh fakir miskin, tugas dokter terhadap pasien, dan adopsi.

Perincian beberapa masalah tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Penetapan awal Ramadlon dan Syawal

Penetapan awal Ramadlon dan Syawal berdasarkan hisab, seperti yang dilakukan Pemerintah, tidak wajib diikuti. Sebab menurut junhurus Salaf, awal Ramadlon dan Syawal itu hanya ditetapkan dengan ru'yah atau menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari.

2. Kitab-kitab yang mu'tabar

Kitab-kitab mu'tabar yang membahas masalah-masalah agama, menurut para ulama NU, adalah kitab-kitab madzhab empat.

3. Pemotongan hewan

Memukul hewan untuk memudahkan pemotongan atau penyembelihan, seperti terjadi di rumah pemotongan dengan mesin, hukumnya haram karena termasuk menyiksa hewan.

Adapun pemotongan yang didahului pemukulan itu, jika pada hewan tersebut masih terdapat gerakan yang hidup, hukumnya sah dan yang disembelih halal.

Sedangkan menguliti hewan yang masih bergerak-gerak sesudah dipotong, demikian pula memotong-motong dagingnya, hukumnya makruh tapi dagingnya tetap halal.

4. Penjualan kulit udhiyah oleh fakir miskin

Fakir miskin yang menerima pembagian daging/kulit udhiyah lalu menjualnya pada selain muslim hukumnya sah.

5. Tugas dokter terhadap pasien

Apabila ada pasien dalam keadaan kritis, sedangkan pasien itu tidak mampu dan tidak mempunyai keluarga yang bersedia membiayai, maka dokter yang muslim wajib berusaha merawatnya dengan biaya dari dokter itu sendiri atau dari yang lain dengan cara wajib ain atau wajib kifayah.

6. Adopsi

Mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan, dijadikan, diakui sebagai anak sendiri hukumnya haram dan tidak syah.

Dalam Muktamar NU ke 27 di tempat yang sama, pada 8-12 Desember 1984, para ulama NU juga telah bersepakat berdasarkan dalil-dalil syar'iyah terhadap enam masalah yang memerlukan penetapan hukum (figh).

Enam masalah itu yakni: ibadah haji, kurban, zakat, talak, salat jum'at, dan masalah cek. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Ibadah haji

Mengenai mana yang lebih utama, pelaksanaan "haji

ghoirul wajib" atau "amal sosial"? Dalam hal ini ada dua pendapat yakni:

- a) Lebih utama haji
- b) Lebih utama amal sosial

Haji ghoirul wajib yakni haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya; hukumnya fardlu kifayah bila dilakukan orang merdeka yang mukallaf. Bila dilakukan hamba sahaya, anak kecil, atau orang gila; hukumnya menjadi sunnah.

Sementara itu, amal sosial hukumnya juga ada yang fardlu kifayah dan adapula yang sunnah.

2. Masalah kurban

- a) Menyembelih kurban tidak dibagikan, tapi dibiarkan sehingga yang membutuhkan mengambil sendiri-sendiri, hukumnya sah.

Mengenai membiarkan kurban (tidak membagikannya), maka jika kurban tersebut kurban mandub, maka menurut pendapat yang lebih kuat menurut syafiiyah adalah meninggalkan kewajiban. Dan jika kurban tersebut kurban wajib hukumnya meninggalkan kewajiban dan menurut Al-Hanafiah meninggalkan kesunnahan.

- b) Kurban tidak boleh dengan nilai uang.
- c) Penyembelihan kurban diluar hari nahr dan tasyrieq, hukumnya tidak sah sebagai kurban sunnah dan sah sebagai kurban wajib. Tapi dalam kurban wajib ini, orang yang berkorban berdosa dan status kurbannya menjadi kurban qadla.
- d) Tidak boleh membiarkan hewan kurban tetap hidup untuk diserahkan pada fakir-miskin sebagai modal usaha yang lebih produktif. Akan tetapi, menurut sebagian Hanafiah, jika hewan kurban ditahan hingga melewati hari-hari tasyrieq, maka hewan itu wajib disedekahkan hidup-hidup.
- e) Menjual kulit-kulit hewan kurban tidak boleh kecuali oleh yang berhak dari golongan fakir miskin. Sedangkan yang berhak dari golongan kaya, menurut pendapat yang mu'tamad, tidak boleh.

3. Masalah zakat

- a) Panitia zakat dapat disebut amil zakat, apabila memenuhi syarat-syarat yang antara lain: adanya pengangkatan langsung dari Imam.
- b) Badan-badan sosial tidak dapat memperoleh bagian zakat, karena tidak termasuk salah satu golongan delapan yang berhak memperoleh zakat.
- c) Zakat tidak boleh ditasarrufkan untuk kepentingan kemaslahatan umum yang lain. Namun, ada pendapat yang dikutip Iman Qoffal, yang menyatakan boleh.
- d) Juga tidak boleh, zakat atau sebagiannya dijadikan modal usaha bagi panitia-panitia atau badan-badan sosial.

e) Zakat fitrah tidak boleh dijual kecuali oleh yang berhak

4. Masalah talaq

Muktamar NU yang ke-27 mengusulkan pada Pemerintah agar meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang beberapa hal yang menyangkut perkawinan dan khususnya mengenai perceraian (talaaq) bagi yang beragama Islam.

5) Shalat jum'at

a) Menyelenggarakan shalat jum'at ditempat-tempat seperti kantor-kantor, apabila diikuti oleh orang-orang yang tinggal menetap sampai bilangan yang menjadi syarat syahnya jum'at dan tidak terjadi penyelenggaraan jum'at lebih dari satu, maka hukumnya sah.

b) Dalam madzhab Syafi'i, penyelenggaraan jum'at lebih dari satu yang melebihi hajjah, hukumnya tidak boleh.

Yang dimaksud hajjah ialah sulitnya berkumpul antara lain karena sempitnya tempat, atau adanya permusuhan, atau jauhnya pinggir negeri.

6. Masalah cek

a) Menggunakan cek dalam muamalah/tijarah hukumnya boleh.

b) Sedangkan pembayaran menggunakan cek kosong adalah tidak syah, sebab termasuk tsaman yang majhul.

c) Adapun hukumnya mencairkan/menguangkan cek mundur dengan potongan berdasar prosentase, tergantung pada aqadnya:

(1) Kalau dengan aqad jual beli, maka hukumnya sah, sebab cek termasuk dapat dimanfaatkan.

(2) Kalau dengan qardl, hukumnya tidak sah, karena termasuk qardl yang menarik kemanfaatan/keuntungan.²⁷⁰

Demikianlah penetapan hukum (figh) terhadap masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Dan masih banyak lagi brosur-brosur atau buku yang memuat hasil-hasil penetapan hukum (figh) ini antara lain:

- Hasil keputusan Konggres dan Mubes Jam'iyah Ahlith Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah.

- Kumpulan Masalah Agama Keputusan Musyawarah Syuriah NU Wilayah Jawa Tengah.

- Hasil-Hasil Keputusan Munas/Konbes pada pertengahan Nopember 1987 di Cilacap Jawa Tengah.

- Dan lain-lain.

d. Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Adapun peran serta NU dalam pembinaan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya terbatas memberikan saran-saran lewat media massa atau ceramah-ceramah umum. Sampai kini, NU belum memiliki Lembaga atau Badan yang khusus untuk membina penganut Kepercayaan yang lazim disebut Islam Abangan.

Sebenarnya para penganut Kepercayaan atau pemeluk Islam KTP/Abangan, sangat membutuhkan dan menunggu para mubaligh Islam untuk mendapatkan pengarahan-pengarahan yang dapat menjelaskan Islam. Mereka adalah pemeluk Islam yang tahu sedikit saja tentang masalah ke-islaman, karena itu masih membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut. Keadaan tersebut tercermin dalam pemikiran Surjadi, pimpinan pusat PDI, yang diucapkan pada tahun 1987 yakni:

Begini, saya ada pengalaman pribadi, saya berasal dari lingkungan masyarakat yang Islamnya hanya statistik. Di daerah saya dalam satu kecamatan waktu itu hanya ada satu masjid saja. Masjid itu hanya efektif seminggu sekali pada hari Jum'at, tidak ada orang yang sembahyang lima kali sehari.

Orang melaksanakan khitanan misalnya, itu nggak ada kaitannya dengan Islam. Jadi khitanan itu dianggap sebagai adat saja. Dia tidak memahami bahwa itu bagian dari ajaran Islam, meskipun namanya "sunat". Kalau punya anak laki-laki sudah berumur 10-13 tahun kok tidak segera disunat, nanti dia dianggap tidak umum.

Saya pernah mencoba mendatangkan orang untuk memberikan pelajaran Islam yang benar, sebab di tempat saya kalau ada orang dari daerah lain sembahyang disitu, jadi tontonan. Tontonan yang betul-betul tontonan, dilihat orang banyak, karena tidak pernah melihat orang yang begitu.

Nah yang menjadi pertanyaan saya bukankah kenyataan seperti itu masih juga berkembang pada masa sekarang.

Untuk apa kita pergi ke Irian Barat menyebarkan Islam misalnya, sementara di depan hidung kita sendiri jutaan -pada waktu itu- orang yang mengaku Islam tetapi tidak tahu Islam. Bukan berarti tidak perlu mengislamkan orang-orang yang belum beragama Islam, tapi apakah yang di depan hidung kita itu juga tidak sama perlunya untuk di-Islamkan, atau dibenarkan pemahamannya terhadap Islam, diajarkan dan diberitahukan apa sebenarnya Islam itu.

2. Pendidikan

Partisipasi NU dalam pembangunan pendidikan, boleh dikatakan besar. Untuk mengembangkan pendidikan, NU memiliki Lembaga, yakni Lembaga Pendidikan Ma'arif (LPM) NU

LPM NU ini, pada 6-8 Mei 1985, telah menyelenggarakan Munyawarah Nasional ke-2 di Gedung Perwakilan Angkatan Laut, Malang Jawa Timur. Dalam musyawarah itu, diikuti 84 peserta dari 18 propinsi.²⁷²

Musyawarah Nasional (Munas) LPM ini, kurang diminati oleh aktivis-aktivis NU "Entah mengapa, orang-orang NU tidak begitu berminat mengikuti Munas Ma'arif," kata seorang peserta dari Situbondo. Padahal, LPM termasuk lembaga yang penting bagi NU.²⁷³

Pernyataan peserta itu, senada dengan sinyalemen Pjs. Ketua LPM NU Drs. H. Musa Abdillah. Dalam pidato pertanggung jawabannya, ia mengingatkan pentingnya LPM NU dalam mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan ajaran NU "Melalui pendidikan, proses tranformasi budaya dan ilmu pengetahuan dapat berlangsung mantap dan berkesinambungan," katanya.²⁷⁴ Selanjutnya ia menguraikan:

Orang yang mencintai Ma'arif pasang surut. Dulu, ketika Ma'arif jaya, banyak orang cinta Ma'arif. Ma'arif merupakan kebanggaan mereka. Melalui Ma'arif, orang bisa meniti karir. Lewat Ma'arif orang bisa mendapatkan pekerjaan. Walhasil, Ma'arif diperlakukan seperti gadis idola. Sampai-sampai, ketua Ma'arif lebih populer ketimbang ketua NU

Tapi belakangan ini, gadis Ma'arif mulai dijauhi. Usaha-usaha Ma'arif malah dihalang-halangi, dipersulit, dihina, dan mungkin dicaci. Tragisnya, orang yang menjauhi, mempersulit, membuang muka, dan menghalangi Ma'arif itu, justru mereka yang pada masa jayanya Ma'arif, menjadikannya sebagai kebanggaan dirinya, sebagai obat mujarab untuk meniti karir dan mempromosikan dirinya.

Namun, roda masih berputar dan sejarah itu berulang. Kini Ma'arif akan bangkit kembali dan gadis Ma'arifah mulai dilirik perjaka. Gadis Ma'arifah mulai genit, cantik dan menarik. Ma'arif sedang bangun kembali²⁷⁵

Beberapa hasil yang dicapai Munas antara lain:

a. Perbaikan mengenai asas dan sifat dalam Anggaran Dasar. Sebelumnya asas dan sifat ini dijadikan satu dalam pasal 3. Kemudian dipisah menjadi pasal 3 dan 5. Pasal 3 menjelaskan bahwa LPM berasaskan Pancasila dan pasal 5 menerangkan bahwa LPM bersifat sosial pendidikan.

b. Mengenai penambahan kata "NU" dibelakang kata "LPM".

c. Munas mengusulkan agar Depdikbud menambah jumlah jam untuk mata pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah. Dan SK Dirjen Dikdasmen no.001, tentang pemilihan agama bagi murid diintensifkan pelaksanaannya.

d. Mengenai landasan dasar kebijaksanaan pengembangan pendidikan di lingkungan NU. Masalah ini²⁷⁰ belum tuntas dibicarakan dan diserahkan pada tim ahli.

Data jumlah madrasah dan sekolahan dilingkungan LPM, pada 1985, cuma 2168 buah. Dan setelah disempurnakan, berdasarkan laporan susulan, data itu meningkat menjadi 2318 buah. Namun, menurut Musa Abdillah, jumlah terakhir masih bisa meningkat lagi, sebab masih banyak yang belum setor data sekolahan²⁷⁷.

Untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan sekolahan yang dikelola NU itu, tidak mungkin dikaji seluruhnya, sebab jumlahnya sudah mencapai ribuan. Karena itu, berikut ini diambil satu kasus yang tentunya belum dapat mewakili keseluruhannya, yakni Unuversitas Sunan Giri Surabaya.

Universitas Sunan Giri (Unsur), pada 25 Januari 1987, telah memperingati Dies Natalis ke 10 di Gelora Pancasila, Surabaya. Dalam peringatan itu, juga diramaikan dengan pelantikan 160 sarjana negara dan rinciannya nampak pada tabel no.3.

Tabel 3. Pelantikan Sarjana Negara Unsuri tahun 1987

Fakultas	Jumlah Sarjana
Sosial Poitik	22
Hukum	66
Pendidikan (Tarbiyah)	16
Teknik sipil	40
Ekonomi	16
Total	160

Sumber: Aula, 03 Thn.IX (Maret, 1987), hal.36.

Para sarjana yang dilantik itu, merupakan lulusan yang pertama sejak Unsuri berbenah diri sepuluh tahun sebelumnya. Disamping itu, pada 1984, Unsuri melepas 77 Sarjana Muda Negara; dan setahun kemudian, yakni 1985, dilepas lagi 260 Sarjana Muda Negara.²⁷⁸

Unsuri lahir pada 1960, berkedudukan di Malang. Waktu itu terkenal dengan sebutan "Akademi Ilmu Pendidikan Agama Islam". Akademi ini, berkembang mengikuti romantika NU. Dan pada 1970, dirubah menjadi "Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri" (UNU Sunan Giri). UNU memiliki beberapa Fakultas yang tersebar di daerah-daerah, sebagian besar Fakultas Tarbiyah. Disamping itu, ada juga Fakultas Hukum di Malang dan Fakultas Ekonomi di Surabaya.²⁷⁹ Selengkapnya lihat tabel no.4.

Tabel 4. Fakultas-fakultas Di lingkungan UNU Sunan Giri

Nama Kota	Fakultas
Surabaya	Tarbiyah, Ekonomi, Teknik mesin Teknik Sipil, dan Sosial Politik.
Malang	Trbiyah, Hukum, dan Pertanian.
Mojokerto	Tarbiyah, Teknik, dan Sosial Politik.
Gresik	Hukum, Tarbiyah.
Ponorogo	Tarbiyah.
Tuban	Tarbiyah.
Lamongan	Tarbiyah.

Sunber: Aula, 03 Thn.IX (Maret, 1987), hal.38-39.

Di tengah berkecamuknya perjuangan memperbaiki UNU Sunan Giri, tiba-tiba pada 1980, datang peraturan dari Depdikbud yang isinya antara lain: beberapa Fakultas di luar Surabaya, harus memiliki status tersendiri. Dengan kata lain, harus berdiri sendiri terpisah dari Surabaya.²⁸⁰

Karena itu, beberapa cabang di daerah-daerah, kemudian menjilma menjadi beberapa Universitas antara lain: Unuversitas Islam Malang (UNISMA), Universitas Islam Gresik (UNIG), Universitas Raden Wijaya di Mojokerto, dan yang di Surabaya menjilma menjadi Universitas Sunan Giri (Unsuri). Sedangkan Fakultas-Fakultas di Ponorogo dan Lamongan dikelola langsung oleh Kopertis IV/IAIN Sunan Ampel Surabaya.²⁸¹

Sejak tahun 1980 hingga 1985, para pimpinan Unsuri berjuang keras untuk mendapatkan lokasi yang dapat dijadikan kampus. Dan mereka telah berhasil mendapatkan lokasi itu yakni di daerah Waru, Sidoarjo, seluas 4 hektar. Berbarengan dengan itu, pada 1985, Unsuri telah memperoleh bantuan gubernur Jawa Timur sebesar Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembangunan kantor sekretariat dan beberapa ruang kuliah. Dana ini tentu tidak cukup, karena itu Unsuri memanfaatkan bantuan kredit dari BPD sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kredit ini, diharapkan dapat dicairkan pada awal 1988. Yang

menggembirakan, beberapa pelaksana proyek pembangunan itu, justru dari Fakultas Teknik Unsuri sendiri.²⁸²

Sambil menunggu selesainya pembangunan kampus, pada 1987, perkuliahan Unsuri masih menempati TPP Khadijah Surabaya. Itupun hanya diperkenankan sore hari. Karena paginya dipergunakan sendiri oleh TPP. Sedangkan kantor pusatnya, pada saat itu masih beralamatkan di Jln. Citarum I, Surabaya.²⁸³

Walaupun begitu, sejak 1985, Unsuri sudah menerapkan program Strata I (SI) dengan status terdaftar. Bersamaan dengan itu, Sistem Kredit Semester (SKS) dapat diterapkan secara penuh.²⁸⁴

Keberhasilan tersebut, tentunya tidak dapat dipisahkan dari para pimpinan yang mengendalikan Unsuri. Mereka itu antara lain: Dr. Muhammad Thahir sebagai ketua Yayasan, H. Muchsin SH. sebagai Rektor, dan didukung beberapa intelektual muda yang potensial semisal: Drs. A. Nizar Hasjin, Drs. Muhyiddin Suwondo MA., dan Drs. Abdul Malik.²⁸⁵

Demikianlah sebuah contoh lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh warga NU Disamping itu, warga NU juga memiliki pesantren sebagai media pengembangan pendidikan, disamping bentuk-bentuk madrasah. Kini, sebagian besar pesantren, sudah memakai sistem madrasah yakni sistem klasikal dengan menggunakan tingkatan kelas-kelas. Sebelum itu, pesantren menerapkan sistem sorogan, bandongan dan halakoh.

Menurut Dr. Mukti Ali MA., pesantren banyak menghasilkan ulama-ulama dan pimpinan-pimpinan masyarakat. Mengapa demikian? Barangkali hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan yang ada di pesantren itu. Selanjutnya, Mukti Ali menguraikan ciri-ciri pendidikan di pesantren antara lain:

a. Adanya hubungan yang akrab antara murid (santri) dengan kiyai. Kiyai itu memperhatikan sekali pada muridnya. Hal ini dimungkinkan karena mereka tinggal di satu pondok atau kampus.

b. Tunduknya santri pada kiyai. Para santri menganggap

menentang kiyai, selain dianggap kurang sopan juga bertentangan dengan ajaran agama.

c) Hidup hemat dan sederhana benar-benar dilakukan dalam kehidupan pesantren. Hidup mewah tidak terdapat dalam kehidupan pesantren itu. Bahkan tidak sedikit para santri itu hidupnya terlalu sederhana dan terlalu hemat hingga mengabaikan kesehatannya. Orang mengetahui bahwa hidup hemat dan sederhana merupakan syarat mutlak bagi suksesnya pembangunan yang harus terus menerus kita lakukan ini.

d) Semangat menolong diri sendiri amat terasa dan kentara di pesantren. Hal ini disebabkan para santri itu menyuci pakainnya sendiri, membersihkan kamar tidurnya sendiri dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang memasak makanan sendiri.

e) Jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pesantren. Hal ini disebabkan kehidupan yang merata dikalangan para santri, juga para santri harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama, baik yang berupa pekerjaan-pekerjaan yang bersifat agama, seperti shalat berjamaah; atau yang bukan bersifat agama seperti membersihkan tempat shalat, masjid, tempat belajar secara bersama.

f) Disiplin sangat ditekankan dalam kehidupan pondok pesantren itu. Pagi-pagi benar antara jam 4.30 atau 5.00 pagi bapak kiyai telah membangunkan santri untuk diajak shalat bersama (berjamaah). Bahwa pendidikan yang semacam itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan orang, tidak perlu diragukan.

g) erani menderita untuk mencapai suatu tujuan merupakan salah satu pendidikan yang diperoleh dalam pesantren. Hal ini dilakukan oleh para santri dengan kebiasaan "tirakat", baik dengan puasa sunnah seperti puasa senen-kemis, shalat tahajjud di waktu malam, i'tikaf di masjid dengan merenungkan kebesaran dan kemurnian Allah, maupun dengan amalan-amalan lainnya.²⁸⁶

Menurut laporan Departemen Agama, pada 1981, di seluruh Indonesia terdaftar 5.373 psantren dengan jumlah santri 1.238.967. Ribuan pesantren ini sedang dalam perubahan. Sekurang-kurangnya, bentuk-bentuk baru mulai bermunculan. "Dan kita tak mungkin menangisi hilangnya bentuk-bentuk lama," kata Dr. Zamakhsari Dhofir. Namun ia menandakan bahwa keluaran pesantren, kecil sekali kemungkinannya menjadi penganggur, dibanding keluaran model SMP-SMA.²⁸⁷

Dalam hal keluaran pesantren ini, secara menarik

kiyai Machrus mengemukakan, "Biar anak-anak sekolah umum ingin jadi pegawai, anak-anak pesantren hendaknya ingin jadi manusia yang berguna saja. Ramai-ramai ingin jadi orang kantor itu menyusahkan pemerintah saja".²⁹⁹

Tipe alumni pesantren memang berfariasi. Menurut M.H. Billah, dari Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama, ada empat tipe alumni pesantren. Tabel 5 berikut menjelaskan keempat tipe itu.

Tabel 5. Tipe Alumni Pesantren

Tipe	%	Keterangan
a. Semangat wiraswasta menonjol, ... 25... semangat berda'wah lumayan, dan semangat menjadi pegawai tipis.	25...	Banyak dihasilkan pesantren Tebu Ireng.
b. Semangat wiraswasta tipis, ... 31... semangat da'wah tinggi, dan semangat jadi pegawai negeri lumayan.	31...	Banyak berasal dari pesantren-pesantren di Jawa Barat.
c. Semangat wiraswasta tipis, ... 32... semangat berda'wah lumayan, dan semangat jadi pegawai negeri tinggi.	32...	Banyak dihasilkan pondok Gontor, Ponorogo Jawa Timur.
d. Semangat Wiraswasta sama besar... 8... dengan semangat jadi pegawai, dan semangat da'wahnya tinggi.	8...	Banyak dihasilkan pesantren di Jawa Tengah seperti: Krapyak, Lasem, Kebarongan.
e. Tidak jelas	4.....	—
Total	100	

Sumber: *Tempo*, 50 Thn.XIV (Februari, 1985), hal.63.

Seperti dikatakan terdahulu, pesantren sedang dalam

proses perubahan, dan bentuk-bentuk baru mulai bermunculan. Hal ini nampak di pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah.

Pesantren Pabelan mendirikan Institut Pengembangan Masyarakat pada 1986 -sebuah bentuk perguruan tinggi alternatif, yang bertujuan mencetak kader-kader pembangunan masyarakat kelas bawah. Atau dalam bahasa K.H. Hamam Dja'far, pimpinan pondok Pabelan, bermaksud meluluskan "ulama cendekiawan yang lebih peka terhadap masalah-masalah sosial".²⁹⁰

Dalam institut tersebut, petani atau tukang kayu diundang sebagai dosen. Disamping itu, didatangkan juga dosen tamu dari orang-orang pilihan. Diantaranya Muchtar Buchori, peneliti bidang sosial-budaya dari LIPI; Dawam Raharjo, salah seorang pimpinan Lembaga Penelitian, pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES); Nurcholis Majid, dosen Pasca sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Abdurrahman Wahid, ketua umum PBNU; Arif Budiman, yang bekerja di lembaga penelitian Universitas Satya Wacana, Salatiga; dan juga Y.B. Mangunwijaya, pastor dan arsitek yang mengajar di UGM.²⁹⁰

Disamping itu, ada beberapa pesantren yang mengasuh anak-anak usia balita. Berikut ini, kasus yang terjadi di pesantren Al-Husain di Magelang dan Manbaul Hisan di Gresik.

Suasananya mirip panti asuhan. Sejumlah anak balita dan yang lebih besar lagi, tampak berlarian di halaman. Lainnya duduk bercelotoh di teras, main petak umpet atau mobil-mobilan. Yang terasa kurang, karena tak seorang anakpun terlihat membaca buku cerita, surat kabar atau majalah. Atau juga mendengarkan radio. Benda-benda itu memang tak ada disana. Bukan karena mahal, melainkan kegiatan untuk itu memang tak dibolehkan, karena dinilai bisa menjurus ke hal-hal yang negatif. Mereka adalah anak-anak yang sedang asyik bermain. Santri-santri cilik di pesantren Al-Husain pimpinan kiyai muda, K.H. Mukhsin, 38 tahun. Pesantren ini, terletak di kelurahan Sucen, kecamatan Salam. Atau kira-kira 20 km dari kota Magelang arah ke selatan menuju Yogyakarta.²⁹¹

Al Husain, tergolong pesantren yang masih muda.

Didirikan pada 1982; tiga tahun kemudian, 1985, pondok ini coba-coba membuka pendaftaran santri balita. Ternyata, peminatnya melimpah. Begitu kesempatan dibuka ada 100 orangtua yang mendaftarkan anak-anaknya. Dan tahun berikutnya, 1986, jumlah peminat naik dua kali lipat. Pada 1987, jumlah santri cilik sekitar 300. Mereka menempati bangunan-bangunan sederhana, seluas 0,5 hektar. Terasa sesak memang, sampai-sampai, Mukhsin terkadang hanya bisa tidur di kios. "Semua kamar dan sudut rumah saya, habis direbut anak-anak", katanya tertawa.²⁰²

Yang bisa diterima disitu adalah anak-anak yang minimal berusia 3 tahun 8 bulan. Dan anak-anak seusia ini, yang diantar orang tuanya dari berbagai daerah seperti Cirebon, Lampung, dan Sumatera Selatan, memang sudah bisa menerima pelajaran. Mula-mula mereka diajari alif-ba-ta dan do'a-do'a pendek, seperti do'a sebelum makan, do'a usai shalat, atau do'a melewati makam. Setelah itu meningkat dengan membaca dan menulis huruf Arab, dan kemudian mengaji Qur'an. Tapi, mungkin karena usianya yang begitu belia, anak-anak itu ternyata lambat dalam menerima pelajaran. Mereka masih lebih senang main-main.

Sejak 1988, batas usia minimum dinaikkan menjadi 5 tahun. Syarat lain: membayar uang pangkal Rp.5.000 (lima ribu rupiah dan uang bulanan Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah). Uang bulanan ini diperuntukkan bagi biaya pendidikan, pondokan, makan tiga kali sehari dan uang jajan untuk anak yang diberikan Rp.50 (lima puluh rupiah) per anak perhari. Meski batasan usia sudah dinaikkan, problem terutama dihari-hari pertama si anak ditipkan orang tuanya untuk tinggal di pondok, tetap masih ada.²⁰³

Sering terjadi, si anak menangis tak kunjung henti. Adakalanya ia buang air besar atau kecil di celana. Dan kalau begitu yang repot adalah santri senior (remaja) yang menjadi pembimbing dan pengasuhnya. Setiap 25-30 anak dibimbing oleh dua santri senior, yang bertugas mengurus keperluan santri cilik. Mulai dari mencuci pakaian, menyetrika, memandikan, memberi tuntunan, dan mengawasi

perkenbangan masing-masing anak. Dia pula yang setiap dua hari sekali membawakan dongeng, terutama bila anak-anak rewel atau tak mau tidur. Dongeng yang dibawakan, bukan sebangsa Cinderella atau Timun Emas, tapi melulu kisah tentang nabi-nabi. Atau cerita yang seram tentang jin dan setan.

Dikala subuh, anak-anak terutama yang sudah menginjak usia 6 tahun, dibangunkan untuk shalat. Pagi hari, seperti umumnya anak-anak, mereka masuk sekolah, sesuai dengan usianya. Yang usia TK belajar di taman kanak-kanak yang terletak dalam pondok. Yang sudah SD sekolah di SD desa Sucen. Atau ada juga yang masuk madrasah. Mukhsin atau santri yang dianggap senior, memberikan pelajaran setelah shalat dhuhur berjama'ah di masjid. Setelah istirahat sebentar, pelajaran dilanjutkan sampai selepas asar. Disambung lagi setelah shalat maghrib, dan isya'. Setelah itu, anak-anak diberi kesempatan menghafal pelajaran sekolah sampai pukul 21.00.²⁰⁴

Tapi anak-anak usia balita harus sudah masuk kamar setelah shalat isya'. Satu kamar berukuran sekitar 15 m² dihuni 20-30 santri cilik. Hampir tak ada yang mengeluh, meski mereka harus berdesak-desakan tidur di lantai hanya dengan alas sehelai tikar. Setelah mereka benar-benar tidur, santri senior yang menjadi pengasuhpun menemui K.H. Mukhsin untuk mengaji. Para santri ini, umumnya lulusan Aliyah -setingkat SMA- yang berjumlah sekitar 50.²⁰⁵

Al-Husain, jelas, bukan pondok pesantren pertama yang mempunyai santri balita. Mukhsin sendiri mengakui bahwa ia memperoleh ide itu setelah melihat pesantren Manbaul Hisan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Berdiri sejak 1966, yang dipimpin K.H. Muhammad bin Shofwan, 77 tahun, kini mempunyai 2000 lebih santri usia 5-6 tahun, yang datang dari berbagai pelosok. Disana, dalam setahun anak-anak dijamin sudah pandai membaca Qur'an dengan fasih. Setiap hari, para satri belajar pukul 07.00-12.00. Selain K.H. Muhammad, yang mengajar adalah para ustadz. Ada 30 ruangan, yang tak ubahnya rumah-rumah biasa, yang digunakan proses belajar.

mengajar.²⁹⁶

Anak-anak dari luar Sedayu mondok di rumah-rumah penduduk sekitar pesantren atau di kediaman K.H. Muhammad. Berbeda dengan Al-Husain, disana tak ada anak-anak yang disekolahkan di TK atau SD. Tapi disana semua santri diajari baca tulis huruf latin. Karena itu, setelah mondok selama satu atau dua tahun, umumnya mereka langsung bisa diterima di kelas II SD.²⁹⁷

Itu sebabnya, meski membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebulan, orang tua tak merasa rugi mengirimkan anak-anaknya, pria atau wanita, kesana. Malah, setiap tahunnya para orang tua berebut untuk bisa mendapat tempat bagi anaknya disana. Anak-anak sendiri, meski harus berpisah dengan orang tua, sepertinya tak sedih benar. "Lha, anak-anak kan malah kerasan bila bertemu dengan teman sebaya," ujar K.H. Muhammad.²⁹⁸

Demikianlah, dua variasi pengembangan pesantren sebagai contoh. Sedangkan pengembangan pesantren itu sangat beragam, tergantung pada pimpinan pesantren, akan dibikin bagaimana pesantren itu. Mereka, memiliki kebebasan. Misalnya: pesantren modern Gontor menonjolkan penguasaan bahasa Inggris dan Arab; pesantren Surialaya, Tasikmalaya, mengambil bentuk pesantren tarekat murni; pesantren plosor, Kediri, mengutamakan pendalaman kitab-kitab kuning melulu, tanpa ada bahasa Inggris, walau bangunan pondoknya mentereng; dan lain-lain. Pada prinsipnya, pesantren itu lembaga pendidikan Islam, namun pengembangannya sangat beragam.

Hampir dapat dipastikan, setiap pesantren mengajarkan kitab kuning, walupun tidak mutlak. Barangkali jarang diketahui, bahwa para Ulama Indonesia tidak hanya memakai kitab-kitab terbitan asing dalam mengajarkan agama. Mereka sendiri mengarang sebagian dari kitab-kitab itu. Bahkan ada beberapa kitab, tulisan Ulama Indonesia yang dipakai diluar negeri. Seperti di Mesir, Arab Saudi, dan Muangtai.²⁹⁹ Beberapa kitab itu dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Kitab-kitab Agama Karangan Ulama Indonesia

Nama pengarang	Alamat	Nama Kitab
a. Kiyai Nawawi	Banten	- Tafsir Qur'an Al-Munir - Nihayatuz Zain.
b. Kiyai Ihsan	Kediri	- Sirajuth Thalibin. - Manahijul Imdah.
c. Kiyai Ma'sum Aly	Jombang	- Al-Amtsilatut Tashrifiyah
d. Syeh Abdurrahman Singkel	Aceh	- Turjumatul Mustafid. - Miratuth Thullab.
e. Syeh Arsyad	Banjar	- Sabilul Muhtadin.
f. Dan lain-lain	—	—

Sumber: *Tempo*, 08 Thn.XV (April, 1985), hal.26. Tidak semua kitab hasil karya dicantumkan. Seperti kiyai Nawawi karyanya mencapai ratusan.

Tafsir Qur'an Al-Munir dan Al-Amstdilatut Tashrifiyah, tidak hanya dipakai di Indonesia, tapi juga dipakai di lingkungan Al-Azhar, Kairo. Bahkan Sirajuth Thalibin (konentar atas Minhajul Abidin Iman Ghazali) dipakai sebagai teks wajib untuk program pasca sarjana di Al-Azhar. Sedangkan Nihayatuz Zain adalah sebuah kitab yang membahas secara lengkap persoalan wadam.³⁰⁰

Turjumaatul Mustafid masih dipakai di Patani, Muangtai. Tahun 1976, di Mesir, kitab itu masih dicetak atas pesanan Muslimin Patani. Bila Turjumatul Mustafid merupakan kitab tafsir, maka Miratuth Thullab dari Syekh yang sama, merupakan kitab figh. Sedangkan Sabilul Muhtadin, tidak hanya dipakai di Kalimantan Selatan, tapi menjadi teks standar dimana-dimana. Kenyataan ini, baru tersingkap ketika Badan Litbang Departemen Agama, pada pertengahan April 1985, menyelenggarakan seminar sehari tentang karya-karya ilmiah agama produk dalam negeri.³⁰¹

Yang agak aneh adalah pengajian kitab kuning dikalangan peserta tarekat. Walaupun kiyainya membaca

sebuah kitab, namun pesertanya sebagian besar tidak membawa kitab. Mereka, pesertanya, hanya mendengarkan saja, dengan khidmat memperhatikan fatwa-farwa kiyai. Para peserta itu, sebagian besar orang-orang tua, laki-laki dan juga perempuan. Namun, kadang-kadang satu dua didapati yang masih setengah baya, atau bahkan masih muda.

Beberapa pesantren, melaksanakan pengajian seperti itu. Khususnya di pesantren yang kiyainya juga seorang pemimpin tarekat. Berikut ini sebuah contoh pesantren di Tasikmalaya Jawa Barat.

Dari Tasikmalaya ke arah Bandung, kira-kira perjalanan 25 km., sampailah di pesantren Surialaya. Pesantren ini didirikan pada 1905, terletak diantara gunung Sawal dan Cakrabuana. Tempat itu berhawa sejuk, lembahnya yang subur nampak indah, terpencil dari suasana keramaian. Cahaya terang terpancar dari menara yang menjulang, mengukir kata "Allah", terasa amat kontras dengan malam hari gelap gulita di pegunungan. Mungkin lampu di menara itu, sebagai lambang kebersihan hati manusia, yang menjadi cita-cita ajaran-ajaran pesantren Surialaya.³⁰²

Komplek pesantren Surialaya merupakan bangunan-bangunan bertembok, terdiri dari: sebuah masjid besar, tempat tinggal kiyai dan keluarganya, gedung sekolah dan ruangan untuk menerima tamu sehari-hari. Berbeda dengan yang lain, pesantren ini tidak mempunyai kamar-kamar dan tempat belajar untuk para santri. Sebab tujuan utama bukanlah itu, melainkan pengajian umum dan bimbingan ibadah bagi orang dewasa.³⁰³

Pimpinan pesantren adalah K.H.A. Shahibul Wata Tajul Arifin, yang sehari-harinya dikenal dengan Abah Anom. Dia, meneruskan ajaran tarekat Qodariyah dan Naqsabaniyah, yang diwarisi dari ayahnya sendiri Syaikh Abdullah Mubarak ibnu Nur Muhammad. Kedua tarekat itu didirikan oleh dua tokoh yang berbeda dan memiliki ciri yang berbeda pula. Tarekat Naqsabaniyah, melarang dzikir dengan suara nyaring. Ia mengajarkan dzikir dengan suara pelan-pelan atau di dalam hati. Sedangkan Qodariyah mengharuskan dzikir dengan suara

keras. Di Suralaya kedua aliran itu dikombinasikan jadi satu.³⁰⁴

Kiyai sebagai pimpinan tarekat mempunyai beberapa badal atau pembantu. Para badal ini bertebaran diberbagai wilayah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, bahkan ada yang di Malaysia. Mereka berwenang mengambil sumpah murid-murid baru atau anggauta baru. Setiap anggauta baru dibai'at dan diberi talkin. Bai'at adalah inisiasi dengan memberikan janji setia, sedangkan talkin semacam pemberian ajaran rahasia pada murid baru. Proses selanjutnya adalah pemberian latihan dzikir, yang juga menjadi tugas para badal di wilayah masing-masing. Pertemuan antara pimpinan tarekat dan para badal itu, secara teratur diadakan setiap bulan, yakni bersamaan dengan malam sebelasan. Sehari sebelumnya, mereka telah berdatangan untuk menerima petunjuk-petunjuk latihan baru. Dan pada malam sebelasan itu, dipraktekkan bersama-sama dipimpin kiyai sendiri. Acara ini berlangsung hampir semalam suntuk. Dan pada kesempatan itu pula, para badal melaporkan perkembangan daerahnya masing-masing.³⁰⁵

Pada pagi harinya, yakni tanggal sebelas, sejak jam 07.00 telah berdatangan ribuan pengikut dari masyarakat umum, untuk mengikuti acara manakiban, yang biasanya dimulai pukul 10.00. Dan setelah usai acara yang dipimpin oleh kiyai sendiri itu, para hadirin dijamu makan siang.³⁰⁶

3. Kesehatan

PBNU periode 1984-1988, telah mentargetkan pembangunan dua buah rumah sakit. Sebuah di pulau Jawa dan sebuah lainnya di pulau Sumatera. Disamping itu, juga dibangun Klinik/BKIA di 15 kabupaten, di luar Jawa. Pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan ini, tentunya tergantung pada biaya yang ada, dan perencanaan proyek yang matang.³⁰⁷

Di Jawa Timur NU memiliki Rumah Sakit Islam Surabaya. Rumah sakit ini, terletak di Wonokromo, bagian selatan kota Surabaya. Dan kini, menjadi pamor NU, utamanya di Surabaya.

Pada mulanya, merupakan angan-angan ibu-ibu musli-

mat, yang ingin mendirikan rumah sakit bersalin. Pada pertemuan 4 Maret 1970 di Jln. Jetis, Wonocolo, Surabaya, angan-angan itu diperluas dengan rencana membuat rumah sakit. Gagasan ini disepakati sebagai pelaksanaan Fardlu Kifayah untuk menolong penderita. Mereka yang bersepakat itu antara lain H.A. Zaki Ghoefron, H.A. Mujid Ridlwan, H. Anas Thohir, Ibu H. Yasin, Ibu Maryam Thoha, Ibu Murthosiah, dan Ibu Afifah Yahya. Selanjutnya, muslimat menyediakan tanah seluas 1 hektar dan bapak-bapak sebagian mencari duit dan kelengkapan lainnya.³⁰⁸

Setahun kemudian yayasan dibentuk, yakni "Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya" (YARSIS), di rumah K.H. Thohir Syamsuddin, Peneleh III/44 Surabaya, 21 April 1971. Hadir dalam rapat itu, K.H. Mukhtar Faqih dan H.M. Sholeh. Kemudian, dihadapan Notaris Goesti Djohan, YARSIS diresmikan dengan akte: 35/Jan. '72. Bertindak sebagai pendiri Yayasan, yakni H. Zakki Goepron, Muchsin Istihsan, SH., dan M. Hoessaini Tiwai. Selanjutnya, yayasan mulai merencanakan pembangunan gedung. Dikontaklah 4 pemborong, yakni PT Kusuma Jaya, Surabaya; PT Teknas, Surabaya; PT Untung, Malang; dan PT Ramuco, Jakarta. Pemborong pertama, hanya mampu menyelesaikan pondasi gedung, lalu mengundurkan diri. Pemborong kedua dan ketiga hanya menandatangani kontrak. Dan pemborong keempat, PT Ramuco, berhasil menyelesaikan gedung utama berlantai dua menghadap Jln. Raya A. Yani. Demikian juga gedung B, C, D, E, F, G, H, dan J. Sedangkan gedung I, dua lantai, belum rampung.³⁰⁹

Gedung utama lantai satu, digunakan sebagai kantor dan tata usaha RSI, kamar terima, dan laboratorium. Dan lantai dua, dipakai sebagai kantor YARSIS, ruang direktur RSI, dan Operation Room. Gedung B, untuk fasilitas persalinan dan bedah. Gedung C, untuk kamar pasien kelas VIP. Gedung D, E, F untuk kamar pasien kelas 2, 3 dan 4. Sedangkan kamar mayat, cuci, setrika dan dapur di gedung G. Musholla, juga beberapa kamar VIP lagi, menempati gedung H dan J. Mengenai gedung I yang belum rampung, dilanjutkan oleh H. Thoyib, dermawan asal Madura, dan dapat diselesaikan

dua tingkat. Lantai bawah, untuk kamar obat, BKIA, poliklinik, dan ruang rontgen. Lantai atas, untuk ruang perawatan anak-anak yang diberi nama Paviliun Fatimah.³¹⁰

Pada 12 Robiul Awal 1395 H, RSI diresmikan penggunaannya dengan membuka tulisan "Bismillahirrah manirrahim" oleh Prof. H.M. Soetoyo Soetejo, penasehat RSI. Sholawat Nabi bergemuruh mengiringi. Karena pada hari itu, bertepatan dengan hari lahir Nabi Muhammad s.a.w., bertepatan tanggal 25 Maret 1975. Pada mulanya, RSI hanya memiliki 20 bed dan 49 karyawan yang melayani poliklinik umum, kesejahteraan ibu dan anak (KIA), dan perawatan kebidanan dengan sarana laboratorium sederhana, dan kamar obat. Kegiatan ini dipimpin direktur RSI, dr. Muhammad Thahir, yang dibantu dr. Mukti dan dr. Hood Assegaf. Sepuluh tahun kemudian RSI memiliki 100 bed dan 211 karyawan. Pada 1979, kepercayaan masyarakat mulai nampak. Peralatan paramedis, tenaga medis, dan tenaga non medis bertambah pula. Dokter spesialis ada 52 orang, dokter umum 6 orang, paramedis 106 orang, tenaga non medis 99 orang, dan beberapa tenaga pembantu. Jumlah pasienpun meningkat. Pada 1975 ada 242 orang, 1976 menjadi 1817 orang, dan 1985 menjadi 7172 orang. Seluruhnya, dihitung mulai 1 Januari - 30 Desember di tiap tahun.³¹¹

Sejak 1983, RSI menambah pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD). Fasilitasnya sebagian dibantu RS Dr. Sutomo, Karang Menjangan. Melihat RSI yang sudah maju dan mapan, dr. Muhammad bermaksud melanjutkan study mengambil spesialisasi kedokteran jiwa. Jabatan direktur diserahkan pada dr. H. Abdul Mukti; dan dr. Muhammad mengambil peran wakil direktur di bidang pendidikan. Pergantian ini terjadi pada 1985. Abdul Mukti ingin melanjutkan kemajuan yang telah dicapai. Pembinaan bidang management dirasa perlu juga, karena ada 20 BKIA bergabung dibawah koordinasi RSI, bahkan ada sebuah BKIA di wilayah Jawa Tengah. Dalam rangka ini, pada 25 Maret 1986, ia mengadakan pertemuan dengan BKIA dan beberapa Rumah Bersalin Muslimat diseluruh Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, disamping perkenalan direktur baru, juga

dipaparkan rencana kerja RSI, terutama yang berkaitan dengan pembinaan BKIA di daerah-daerah.³¹²

Dana pengelolaan RSI, disamping diperoleh dari pasien, juga dari Presiden Suharto, kredit Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Daerah, Depkes RI, Penda Jatim, Kodya Surabaya, Arab Saudi dan Kuwait. Dan juga bantuan dari dermawan muslim Indonesia di Jeddah. Hambatan yang dialami RSI tidak begitu berarti, kecuali dari pengunjung yang bandel, "inikan rumah sakit Islam," ujar seorang pengunjung sambil menggelar kambal, lantas ngobrol, sehingga menjadi penghalang perawatan pasien. "Di RKZ mau dianjurkan disiplin, di RSI miliknya sendiri malah tidak disiplin. Aneh bin ajaib," kata dokter yang menasehati.³¹³

4. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Peranserta NU dalam pembangunan di bidang ini, dilakukan dengan membentuk Lembaga Kemasyarakatan Keluarga Nahdlatul Ulama atau LKK NU. Lembaga ini, pada 29 April 1985, telah melakukan reformasi.³¹⁴

Dalam prakteknya, warga NU disamping mengikuti program-program pemerintah, juga membangun beberapa BKIA. Di Jawa Timur saja terdapat 20 BKIA, belum yang di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Berikut ini, kita ikuti sebuah BKIA Muslimat di Jombang, Jawa Timur.

BKIA Muslimat NU Jombang, pernah dinobatkan sebagai BKIA teladan dilingkungan NU Jawa Timur. Maksud didirikan KBIA itu, menurut ketua Yayasan Ny. H. Muktanaroh, untuk membantu dan melayani kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Islam yang mayoritasnya warga Muslimat NU sendiri. Disamping itu, agar warga muslimat tidak terlalu fanatik pada jamu-jamu tradisional. Bahwa proses medis harus diperhatikan, karena lebih praktis, memadai, dan bermanfaat. Selain itu, BKIA dimaksudkan untuk menunjang KB yang digalakkan pemerintah saat ini. "Bahkan BKIA sini, telah menjadi inovator KB," kata Muktaromah, "mulai dari pelayanan perawatan bayi dan anak, ibu hamil dan melahirkan,

imunisasi, dan pelayanan KB".⁹¹⁵

"Pada akhir tiap pengajian rutin di kecamatan, selalu diumumkan pada warga Muslimat; yang membutuhkan perawatan, harap mendaftar pada panitia," kata Muktaromah pula. Segera anjuran itu mendapat sambutan, mereka antri menunggu giliran. Perawatan itu dilakukan bidan-bidan dari BKIA Muslimat. Praktek lapangan ini, sudah dilakukan tiga tahun lalu, semula di Cukir Diwek, kemudian menyusul di 17 kecamatan. Setiap pengajian bisa menolong 50-70 pasien, khususnya kaum ibu sendiri. Kegiatan model ini, dilakukan dua kali sebulan secara bergilir. Jika kontingen Muslimat Cabang turun ke bawah ke MWC dengan membawa beberapa bidan, Muslimat MWC menyiapkan dua kamar untuk praktek. Dalam pengajian selalu diselipkan program KB, sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi Muslimat menolak KB model sterilisasi, vasektomi, dan tubektomi karena dinilai haram.⁹¹⁶

BKIA Muslimat Jombang, didirikan pada 1968. Pertama, hanya membuka poliklinik. Pada mulanya, tiap bulan, cuma dikunjungi 2-3 pasien saja. Hampir ditutup karena pengurus putus asa. Tapi karena terdorong persaingan dengan orang Kristen, maka usahapun digiatkan. Dan pada kurun selanjutnya, BKIA Muslimat memperoleh kemajuan. Pada saat maju itu, BKIA sering dikunjungi tamu manca negara semisal Bangladesh, Nigeria, Thailand, Nepal, Mesir, dan juga beberapa tamu dari luar Jawa. BKIA itu, diperkuat oleh 3 orang dokter anak, seorang dokter umum dan seorang dokter spesialis kandungan. Dibantu 5 bidan dan 14 jururawat, rata-rata pendidikan SPK Sepanjang. Sejak 1965, pembangunan gedung terus diperluas, yang menempati areal seluas 2 hektar.⁹¹⁷

Pada 1986, BKIA memperoleh sumbangan dari BKKBN sebuah sepeda motor Yamaha bebek dan juga satu vet peralatan KB dari Departemen Kesehatan dan Inspektorat Kesehatan. Selain itu, seluruh peralatan dibeli sendiri. Termasuk Volterpon (alat pengukur dan peneliti kandungan) seharga Rp.1.500.0000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan ide pelaksanaan Klinik Muslimat Keliling, bermula dari segerombolan ibu-ibu yang menggendong anak, berkerumunan.

disebuah Gardu. Setelah pengurus Muslimat menanya mereka, dapat jawaban, "sedang menunggu dokter dan mobil keliling dari RS Kristen Mojowarno". Pengurus Muslimat kaget mendengar jawaban itu. Maka, dirintislah Klinik Muslimat Keliling.³¹⁰

5. Teknologi, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian

NU tidak memiliki lembaga yang mengurus teknologi, karena itu partisipasi NU dalam pembangunan teknologi sulit diikuti. Walau secara formal NU tidak terlibat, namun warganya banyak yang aktif. Tentunya teknologi ringan. Berikut, akan dibicarakan. Begitu juga peranserta NU dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian; masih terpaku kuat disektor pengembangan fish, nahwu dan penelitian kitab-kitab kuning lainnya namun juga akan dibahas.

a) Teknologi.

Pesantren ternyata bisa menjadi pusat pengembangan teknologi pedesaan. Setidaknya, laporan dari 15 pesantren -29 hingga 31 Januari 1984 di Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur- menyatakan keberhasilan pesantren mengembangkan teknologi tepat guna di tengah-tengah masyarakat lingkungannya.³¹¹

Pada mulanya, dirintis oleh LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). Pada 1977, mengadakan latihan pengembangan masyarakat untuk sejumlah kiyai dan santri senior yang bersifat non teknis. Misalnya, memberikan motivasi produsen krupuk agar menghemat bahan bakar. "Tapi, kami lalu terbentur soal yang bersifat teknis", tutur Mufid A. Busyairi, lulusan IAIN, salah seorang peserta latihan. Ternyata, diperlukan juga pendidikan ketrampilan. Maka, pada 1981, program itu menambahkan latihan teknologi tepat guna. Acara tiga hari di pesantren salafiah syafiiyah Sukorejo yang lalu itu, untuk menilai program ini. Pesantren dipilih, katena lembaga masyarakat

ini, "merupakan alternatif terbaik sebagai pelaksana pengembangan masyarakat," kata Dawam Raharjo, direktur LP3ES. "Para kiyai dengan mudah mengajak masyarakat bergotong royong tanpa upah. Masyarakat menganggap pekerjaan ini sebagai amal," komentar Craig Carpenter Thorburn, orang Amerika Serikat yang menjadi konsultan LP3ES.³²⁰

Tak hanya itu, teknologi lewat pesantren mudah diterima tanpa kecurigaan. Bahkan tak jarang masyarakat sendiri lantas mengembangkannya. Teknologi bambu-semen misalnya, yang dikembangkan di pesantren An Nuqaiyah, Guluk-guluk, Sumenep, Madura. Teknologi murah ini, diperoleh dengan cara menggantikan kerangka besi dengan anyaman bambu, untuk membuat beton. seperti diceritakan oleh H. Abdul Basith, dalam pertemuan di Situbondo itu, bambu semen sangat efisien untuk membuat bak penampung air. Menurut perhitungan, bak air bambu semen berkapasitas 8000 liter hanya membutuhkan biaya setengahnya dari pada bila dibuat dari dinding beton biasa. Kini, sudah 5 bak air dibangun di Guluk-guluk. "di Mdura, yang kebutuhan airnya tergantung air hujan, bak itu sangat bermanfaat," kata A. Syafii, santri disana.³²¹

Dari ide bambu-semen itu, kemudian dikembangkan menjadi genting serat semen, yang dibuat dari adonan serabut kelapa atau serabut nanas, pasir ayakan, dan semen. Selain lebih kuat, genting serat semen tak merusakkan lingkungan karena tidak menghabiskan tanah liat. Untuk memberikan pelajaran teknologi tepat guna pada masyarakat pedesaan diperlukan berbagai metode. Misalnya metode pameran. Ini dipraktikkan oleh pesantren Asem Bagus, Situbondo, yang dipimpin oleh K.H. As'ad Syamsul Arifin. Ketika tak mendapat tanggapan masyarakat dalam memperkenalkan pompa hidran, maka para santri lantas mendemonstrasikan pompa hidran itu di tempat umum. Hasilnya, pompa hidran kini masyarakat dilingkungan Asem Bagus.³²²

Yang lain, dikisahkan oleh H. Ahmad Zainal Djinan, pendiri pesantren Al-Qodiriyah di Lampung Tengah, dalam

memasyarakatkan pompa tali. Mula-mula, seorang santri membuat pompa itu untuk sumur pesantren. Kepandaian yang diperoleh dari LP3ES ini, lantas ditularkan pada temannya. Dan seterusnya, hingga kepala desa pun ikut belajar membuat pompa, yang dapat menarik air dari sumur yang dalam, tanpa penimba banyak mengeluarkan tenaga. Ini boleh disebut metode getok tular: kampanye lisan, langsung dari orang ke orang. Pada 1984, ada 64 pesantren di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan yang dibina LP3ES. Sukses gagasan ini, antara lain berkat kesadaran para kiyai. Misalnya kiyai Ali Yafie menemukan *figh* yang membahas lingkungan hidup. Atau kiyai Hasyim Zaini dari Probolinggo pernah mengatakan, "sudah saatnya membahas *figh* teknologi".³²³

b) Ilmu Pengetahuan dan Penelitian

"Kita harus kembali menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Dr. B.J. Habibi pada Konferensi Ilmu Pengetahuan Islam untuk Asia Pasifik, 12-15 Februari 1989, di Ancol, Jakarta.³²⁴

Ilmu pengetahuan Islam memang mencakup banyak bidang antara lain kedokteran, teknologi, ruang angkasa, politik, sejarah, dan lain-lain yang tersebar dalam berbagai bahasa dan kitab. Termasuk kitab kining.

Dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Penelitian, NU berulang kali mengadakan seminar kitab-kitab kuning. Seminar-seminar itu, dalam rangka menggali khasanah lama, untuk dijadikan bandingan pemecahan persoalan masa kini.

Pada bulan Maret 1986, PBNU menyelenggarakan diskusi tentang kitab "*Ihya' Ulumuddin*", karya Imam Ghazali, 1700 pagina. Para ulama yang membawa makalah antara lain: K.H. Ali Yafie, K.H.M. Rodli Sholeh, dan K.H.A. Sahal Mahfudz. Persoalan dalam diskusi itu, adalah pemaparan isi kitab lengkap dengan sistematikanya, dan kebesaran Ghazali. Terdapat juga pembelaan, misalnya terhadap kesimpulan bahwa Ghazali telah mematikan filsafat dan semangat berpikir

kreatif. Atau bahwa dari Ghazalilah dengan mistiknya, berkembang semangat fatalis di dunia Islam.³²⁵

Pada bulan Oktober 1986, di gedung PBNU Jakarta, diselenggarakan seminar tentang kitab yang berjudul "Al-Akhkamus Sulthaniyah wal Wilayatud Diniyah" (hukum-hukum pemerintahan dan wilayah-wilayah keagamaan), karangan Imam Mawardi pada abad 5 H/10 M. Buku itu membahas pembentukan Imam atau khalifah, aturan penggantinya, hak-hak istimewanya tugasnya-tugasnya, kemungkinan pemecatannya dan lain-lain. Dan yang terasa menonjol memang kesan peneguhan kekuasaan itu. Untuk kepentingan stabilitas, Al-Mawardi menyatakan selain dapat dipilih oleh sebuah dewan, Imam juga dapat ditunjuk oleh Imam sebelumnya. Dan Imam tidak harus dari calon yang terbaik.³²⁶

Pada 15-17 Desember 1988, juga diadakan seminar di pesantren Darussalam, Watucongol, Muntilan, Jawa Tengah; dihadiri oleh puluhan kiyai. Meraka, tua dan muda, utusan dari 52 pesantren. Dalam seminar itu, mereka sepakat merombak metode telaah kitab kuning (KK) dari yang tektual (harfiah), ke yang kontekstual (siyqi). "Acara itu, sebagai lanjutan diskusi terbatas di Mranggen, Semarang, pada September 1988," kata K.H. Sahal Mahfudz, pimpinan pesantren Maslakul Huda dan pengurus P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Jakarta.³²⁷

Pada seminar itu, ikut berbicara PBNU H. Abdurrahman Wahid. Ia menilai bahwa KK menghadapi tantangan besar. Kemampuan dan keinginan menguasai KK, sudah melorot drastis sejak 30 tahun lalu. Selain kian bertimbun buku terjemahan, sekarang banyak pula kitab bandingannya, seperti karya Al-Maududi dan Syaid Kutub. Bersama itu, modernisasi dari luar juga mulai memasuki pesantren. "Perhatian santri lalu terpecah," kata ketua PBNU itu. Dan ini tentu membuat para santri seperti mendayung diantara dua karang, menjaga warisan lama secara murni atau menerobos dinding penyekat itu, dengan memodernisir KK atau mengaktualisasikan kandungannya.³²⁸

Sedangkan K.H. Tolhah Hasan, dari Universitas Islam

Malang, mempersoalkan orientasi keilmuan, metodologi dan kurikulum telaah KK, yang katanya belum berubah juga. Orientasi santri masih terpaku pada kitab figh, tasawuf dan ilmu bahasa. Sedangkan filsafat dan sejarah disepelekan. Lalu ditanyakan juga metode sorogan: mengajarkan kitab-kitab pada 4-5 murid, supaya ditirunya dan diikuti sepersis mungkin. Juga soal bandongan atau weton, yaitu sekelompok murid, 5-500 murid, mendengar dan mencatat dari seorang guru yang membaca dan menterjemahkan sebuah kitab berbahasa Arab. Metode itu perlu kesabaran dan penguasaan bahasa. "Akibatnya, santri mementingkan kulit, bukan isinya," kata kiyai Tolhah.³²⁹

Sementara itu, kitab Ta'lim al-Mutaallim (pengajaran bagi murid) karya Zarnuji kini dianggap penyebab ketaatan yang ekstrim dari santri pada kiyai dan keluarganya. "Apa itu tidak keterlaluan?" tanya seorang peserta muda. Dan itu merugikan para santri sendiri, karena tak bersikap kritis. Padahal, ketaatan pada seorang itu mestinya dilihat ketinggian ilmunya, bukan karena keturunannya. Kiyai yang "pelit" dan tak terbuka juga digugat. Selama ini ada kiyai bebas mempelajari KK madzhab siapa saja, tak terbatas Syafiiyah atau Asyariah. Hanya khasanah ilmunya itu, tak sampai ke otak santri. Sering, kiyai yang paham mengenahi pendapat Al-Sya'roni lalu disembunyikan untuk santrinya, dengan alasan penulis Subulus Salam itu penganut Syiah.³³⁰

Dalam seminar itu, mereka berhasil menyimpulkan dua cara menelaah KK yang kontekstual. Pertama, pengembangan wawasan kesejarahan atau kandungan KK. Caranya, menghidupkan kembali perhatian pada latar belakang budaya dan peradaban, yang mendukung perkembangan KK itu. Kedua, mengubah kandungan KK menjadi kontemporer (ta'shir). Dan seminar itu ditutup dengan bacaan shalawat Nabi secara bersama-sama.³³¹

Disamping itu, KK juga dikaji dan diteliti secara akademis. "Marah Labid li Kasyfi Ma'na Qur'an Majid" (terminal burung untuk menyingkap makna Qur'an) yang ditulis Syeh Nawawi, sejak 1985, diteliti oleh A. Asnawi, MA. untuk

disertasi di IAIN Jakarta. Kitab itu terdiri dari dua jilid, dengan halaman 511 dan 476. Disini, nama Tafsir itu disebut Al-Munir (penerang). Syeh Nawawi adalah seorang ulama terkenal berasal dari Banten, Jawa Barat. Telah menulis sekitar 115 judul buku, yang mengupas figh, tafsir, hadits, tasawuf, tauchid, nahwu, sharaf, dan lain-lain. Kitab-kitabnya yang dicetak di Bairut dan Kairo, selain beredar di Mesir, Syiria, Saudi Arabia, Indonesia, juga merebak di Malaysia, Muangthai dan Pilipina Selatan. Ia terbilang "penulis kilat". Dalam tempo dua minggu, ia mampu menyiapkan Nurudz Dzulam (cahaya kegelapan), sebuah monograf sebanyak 40 halaman.³³²

Di serambi rumahnya -di kampung Syi'ib Ali, Mekkah- Nawawi memberi kuliah, mulai pukul 7.00 hingga 12.00. Murid-muridnya yang kemudian terkenal di Indonesia antara lain: K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Khalil dari Bangkalan, K.H. Asnawi dari Banten, K.H. Asnawi dari Kudus, dan lain-lain. Dan berkat popularitasnya, maka dibangunlah sebuah pesantren dengan nama "Syeh Nawawi" di desa Tanara, Serang, Jawa Barat. Pembangunan itu, dimulai sejak 1987, dengan dana Rp.81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah), diatas areal 7 hektar. Dan untuk tahap pertama, disiapkan 48 bangunan kelas, untuk para santri.³³³

Di beberapa daerah, KK dikoleksi atau disimpan di perpustakaan atau bahkan di museum. Misalnya di Aceh dan Ternate.

Eks Gubernur Aceh, Ali Hasymy, memiliki koleksi KK beratus judul. Koleksi itu disimpan diperpustakaan Hasymy di Banda Aceh. Disimpan pula disana, 100 manuskrip lebih. Usianya ada yang 150 tahun. Sejumlah manuskrip serupa, bahkan ada yang lebih tua usianya, disimpan di perpustakaan Dayah "Tanoh Abei" (dayah = pesantren tinggi), yang terletak di Seulimeuen, 45 km dari Banda Aceh. Jumlahnya sekitar empat ribu. Dayah itu, didirikan sekitar 400 tahun lalu oleh Teungku Abdul Wahab. Sekarang, keturunan teungku, memeruskan mengelola Dayah tersebut.³³⁴

KK layak dipelajari. Karena buku-buku itulah lalu

muncul mujtahid seperti Imam Syafii, Hanafi, dan Al-Ghazali. "Tanpa merujuk kitab kuning, barangkali dunia ini tidak mempunyai ulama besar," ujar Hasymy.³³⁵ Lalu Abdurrahman Wahid menuturkan, "Ada empat belas peti besar milik sultan Muzaffar Syah dari ternate, yang berisi karya-karya ilmiah ulama tanah air, yang dikumpulkan ketika kerajaan itu masih jaya". Disamping itu, katanya juga, kiyai Mahfudz Termas telah menulis tak kurang dari 40 judul, dan K.H. Hasyim Asy'ari 11 judul.³³⁶

KK itu membahas berbagai persoalan, dan metode pembahasannya juga bermacam-macam. Demikian pula komentar K.H. Ali Yafie, ia mengatakan:

Kandungan KK itu beragam. Tapi yang mendominasi pengertian KK itu adalah kitab ilmu fiqh dan ilmu-ilmu pembantunya. KK yang beredar di pesantren itu, umumnya menggunakan bahasa hukum yang ketat. Malah bahasanya sangat padat, sehingga cenderung seperti bahasa telegram atau bahasa sandi. Untuk memahaminya perlu merujuk ke kitab yang berkomentar atau bercatatan pinggir.

Dalam sejarahnya, KK terus mengalami reformulasi lewat penelitian. Ada koreksi dan evaluasi terus-menerus sejak abad pertama hijriah. Sehingga lahir berjenis KK. Ada yang berstatus sebagai kitab induk, seperti al-Umm (induk) karya Imam Syafii. Lalu ada syarah (komentar), hasyiyah (catatan pinggir), taqrirat (penjelasan) atau ta'liqat (catatan kaki).

Sejak abad ke 6-12 H, reformulasi itu berpuncak pada munculnya kitab-kitab mukhtashar (ringkasan) atau matn (teks). Kitab yang ringkas itulah, karena praktis, jadi bacaan utama di pesantren. Misalnya Al-Fiyah karya Ibnu Malik. Meskipun kurang difahami oleh santri, harus dihafal sedari awal. Sedang penjelasannya, menyusul belakangan dengan mengaji kitab syarah Hudluri (komentar Hudluri). Itulah periode taklid atau keterikatan, yang pada hakekatnya bersifat survival.³³⁷

Disamping itu, NU juga sering mengadakan diskusi-diskusi dengan referensi KK. Diskusi itu berkisar pada penetapan hukum agama (fiqh) terhadap masalah-masalah baru yang sedang terjadi di masyarakat. Diskusi ini populer dengan sebutan "bahtsul masail" (pembahasan berbagai masalah). Dan masalah disini, dihimpun dari berbagai cabang NU di kabupaten-kabupaten. "Hukum itu dicari di kampung, bukan di

pusat," kata kiyai As'ad.³³⁹

Ukuran keahlian dalam bathsul masail, adalah penguasaan berbagai kitab klasik yang tak terhitung, yang di Indonesia terutama tersimpan sebagai khasanah pesantren.³³⁹

"Kadar kedalaman dan pengamalan terhadap KK adalah satu kriteria yang paling representatif untuk mengukur derajat seorang kiyai atas kiyai yang lain," kata Zamakhsyari Dhofier.³⁴⁰

Bila ada satu kalimat yang membenarkan suatu pendapat, dalam sebuah kitab terpandang, tenteramlah para pembahas. Para cendekiawan abad lalu itu, dianggap sudah bersusah payah menafsirkan Qur'an dan Hadits, walau diantara ulama kuno itu kadang-kadang terjadi berbeda pendapat. Meskipun terjadi beda pendapat, harus tetap ada toleransi. "Hukum itu masalah dhonni," demikian menurut K.H.M. Syafa'at, pengasuh pesantren di Blok Agung, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Lalu ia membacakan dari Al-Ghazali sebuah kaidah, "hukum itu berjalan di lidah para ulama setiap zaman dengan segala kepantasan menurut ahlinya".³⁴¹

Dalam bahtsul masail, kesimpulan hukum yang diputuskna dibanding-banding dengan pendapat ulama-ulama terdahulu, misalnya tentang persoalan bekicot.

Munculnya persoalan bekicot bertolak dari usul NU cabang Salatiga. Karena umat disana ramai menanyakan status hukum bekicot itu. Apalagi setelah tersiar acara "dari desa ke desa" di TVRI tentang suksesnya budidaya bekicot di Kediri, Jawa Timur. Maka, NU Jawa Tengah dalam bathsul masail, pada 2-3 Desember 1988, di pesantren Aries, Kaliwungu, Kendal, memutuskan: "haram memakan dan membudidayakan bekicot". Haramnya bekicot ini, untuk yang bermadzhab safii, khususnya warga NU. Dalam madzhab ini, bekicot digolongkan binatang hasyarat, yakni hewan melata yang menjijikkan. Imam Hanafi juga berpendapat serupa dengan Imam Syafii. Bahkan ia menegaskan, ukuran jijik untuk dinakan itu bertolak dari naluri seseorang. Binatang hasyarat selain bekicot, menurut madzhab syafii: tikus, ular, kodok, kalajengking, dan semut. Menurut Hambali haram

makan bekicot, tapi boleh ditenakkan untuk makanan hewan, membuat pupuk, dan untuk obat. Ia malah setuju dijual pada non muslim. Sedangkan menurut Maliki, bekicot halal dimakan atau dibudidayakan.³⁴²

Demikianlah contoh keputusan bathsul masail. Menurut Dr. Nurcholis Majid, orientasi fiqh ini perlu diperluas, dia mengatakan:

Orientasi fiqh memang kuat. Kita masih praktisi. Karena itu, dalam bidang pemikiran, kita masih konsumen, bukan produsen. KK seharusnya kita perlakukan sebagai obyek penelitian, bukan hanya sebagai pegangan kepraktisan.

Lemahnya produktivitas di pesantren itu, karena melupakan metodologi dan sistem berpikir rasional. Ada sesuatu yang salah. Bahwa dalam pembedaan ilmu, yang bersifat penalaran agak tersingkir, dan yang bersifat dogmatis lebih dominan. Sehingga, kebiasaan berpikir rasional di pesantren jadi berkurang.

Saya kira, orang pesantren akan memperoleh kembali dinamika intelektualnya kalau mereka mementingkan ushul al fiqh, dari pada fiqh. Imam Syafii yang diagungkan di pesantren, selayaknya dicontoh. Sebelum menulis kitab Al-Umm, dia menyusun lebih dahulu metodologinya, berupa kitab Al-Risalah (surat). Sayang kitab ini, kurang memasyarakat di pesantren.

Metode penelitian agama, dengan merujuk ke KK klasik, pernah diperkenalkan oleh Thomas Michel SJ, alumnus Universitas Chicago. Thomas, dikenal sebagai ahli Ibnu Taymiah. Kini, metodenya digalakkan di IAIN Jakarta untuk tingkat pasca sarjana. Semoga pihak pesantren juga memulai.

6. Kesejahteraan Sosial

Untuk menggalakkan partisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial, NU membentuk Lembaga Sosial Mabarroth (LSM). Lembaga ini, bertugas mengurus kesejahteraan masyarakat, khususnya warga NU. Struktur organisasinya memanjang mulai dari Pengurus Pusat (PP) berkedudukan di Jakarta, hingga pengurus ranting di desa-desa.

Dalam rangka kesejahteraan sosial ini, muslimat wilayah Jawa Timur mengorganisasikan anak-anak asuh dan membina golongan ekonomi lemah. Kepada anak asuh diberikan bantuan seperlunya. Sedangkan untuk golongan ekonomi lemah,

dibantu dalam pemugaran rumah mereka, agar menjadi rumah yang sehat. Ini pernah dilakukan di desa-desa kabupaten Sidoarjo dan Trenggalek.³⁴⁴

NU juga memiliki beberapa balai ketrampilan, balai rehabilitasi sosial, dan beberapa panti asuhan. Berikut ini, kita ikuti perkembangan sebuah panti asuhan anak yatim di kabupaten Jember.

Pada 1969, di suatu daerah sebelah Barat Daya kota Jember, didirikan sebuah panti asuhan yang diberi nama "Yayasan Badan Penolong Pendidikan Anak Yatim" (Yabappena-tim). Pada mulanya, tidak memiliki gedung sendiri. Anak-anak yatim yang dibina saat itu, dititipkan pada keluarga-keluarga dengan tanggungan Yayasan. Sepuluh tahun kemudian, pada 1979, gedung itu baru terwujud, di desa Gebang Kemudung /56-57, Jember. Bangunan ini hanya menampung 40 anak. Bangunan ini pernah roboh, namun tidak menciutkan nyali pimpinan Yayasan, Abdullah Asyhar, 55 tahun, yang merintis berdirinya Yayasan itu. Panti terus berjalan, sambil ia mendekati berbagai pihak untuk merehabilisir bangunan itu. Sukses dalam usahanya, ketika Bupati Jember meninjau lokasi panti asuhan itu. Bupati Abdul Hadi menyumbang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari kantongnya sendiri, bukan dari APBD. Melihat uang sekian itu, Abdullah mohon pada Bupati agar bantuan itu dirupakan tanah dengan bangunannya. Bupati menuruti permintaan warganya, maka panti asuhan mendapatkan tempat seluas 3125 m², dengan bangunan model SD Inpres. Bangunan itu, sampai 1987, dijadikan pusat kegiatan Yayasan.³⁴⁵

Abdullah Asyhar yang pernah menjadi karyawan Depag itu memang oocok menangani panti itu. Siang dan malam, sebagian besar waktunya dicurahkan untuk kepentingan Yayasan, dan juga kegiatan sosial Mabarrot NU. Pukul 4.00 pagi, ia membangunkan anak-anak untuk shalat subuh. Setelah hari terang, ia melatih berbagai ketrampilan misalnya pertukangan, berkebun, perikanan; dan juga mengajar olah raga, kebersihan dan qiroah. Anak-anak yatim, putra-putri, berasal dari berbagai daerah seperti Bandung, Malang,

Gresik, Banyuwangi dan Jember sendiri. Umumnya mereka bersekolah di madrasah dan sekolah-sekolah umum, baik yang negeri atau yang dikelola LP Ma'arif Jember.³⁴⁶ Jumlah mereka 165, dengan perincian sebagai berikut.

Item	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tinggal dalam panti	86	37	123
Tinggal di luar panti	31	11	42
Jumlah	117	48	165

Untuk pembinaan anak-anak yang tinggal di luar panti asuhan, ada 2 cara. Pertama, dititipkan pada famili atau yang masih ada hubungan kerabat dengan si anak. Kedua, dititipkan pada keluarga bukan famili anak itu. Biasanya, keluarga ini tidak mempunyai keturunan dan menginginkan anak asuh. Kedua cara ini, tetap dalam tanggungan Yayasan, baik pembinaan pendidikannya atau bantuan pembiayaannya.³⁴⁷

Anak-anak yang pendidikannya tersebar di SD, SMP dan SMTA itu, pada pukul 13.15, melakukan kegiatan keterampilan. Pukul 15.00, acara bebas bagi anak-anak, biasanya dipakai untuk kegiatan olah raga. Vally ball putri anak-anak panti, sering menjuarai berbagai turnamen. Pukul 17.30, anak wajib mengaji setelah shalat maghrib. Setelah mengaji, mereka mengulang pelajaran sekolah hingga pukul 21.30. Selanjutnya anak-anak tidur dan bangun menjelang subuh. Program ini, dilakukan dengan disiplin oleh putra-putri panti asuhan, dengan kontrol kebakapan Abdullah yang tidak bosan-bosan berkeliling Asrama dengan earphone. "Anak-anak, sekarang waktunya shalat. Ambil wudlu, lalu masuk musholla," teriak Abdullah di serphonenya.³⁴⁸

Anak-anak putra, dilatih bongkar pasang mesin mobil dan mengemudi. Setiap anak yang tamat SLTA telah mampu mengemudikan mobil dan dibekali dengan SIM, sebagai hasil kerja sama dengan kepolisian setempat. "Jadi kami tidak khawatir nganggur," kata Abdullah apabila mereka kembali ke masyarakat. Kepada anak-anak yang telah mampu mandiri,

Yayasan memberi bekal Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikembangkan. Dari hasil usahanya, tidak diminta mengembalikan modal itu. Hanya kalau sudah jadi, diminta menjadi donatur. Pemasukan panti asuhan, selain donatur juga dari Biro Jasa yang bekerja sama dengan masyarakat. Pada 1988, Abdullah mempunyai 19 orang pembantu, termasuk juru masak. Dan juga sebuah mobil untuk praktek mengemudi bagi anak-anak.³⁴⁹

7. Generasi Muda

Untuk pembangunan dan pengembangan generasi muda, NU memiliki beberapa Organisasi Badan Otonom, yakni organisasi yang menjadi perangkat jam'iyah NU, yang berfungsi membantu melaksanakan kebijaksanaan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu.³⁵⁰

Organisasi badan otonom itu antara lain Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Seperti namanya, GP Ansor untuk para pemuda, IPNU untuk para pelajar, dan PMII untuk para mahasiswa. Dan selanjutnya akan disimak sedikit tentang proses pembinaan generasi muda oleh PMII.

PMII bertujuan, "terbentuknya pribadi muslim yang berbudi luhur, berilmu, bertaqwa kepada Allah, cakap serta bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya". Untuk mencapai tujuan itu, disusunlah rencana pengkaderan, yang dijalankan secara intensip dan terarah. Rencana itu, dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul "Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kader PMII".³⁵¹

PMII sebagai organisasi kader, yakni organisasi yang mendidik para anggotanya agar menjadi kader yang sesuai dengan tujuan PMII, melaksanakan tiga bentuk latihan yang merupakan satu kesatuan sistem, yakni:

a. Latihan formal, ialah bentuk latihan untuk mengembangkan potensi anggauta. Latihan ini terdiri dari dari tiga jenjang yaitu Latihan Kader Dasar (LKD), Latihan Kader

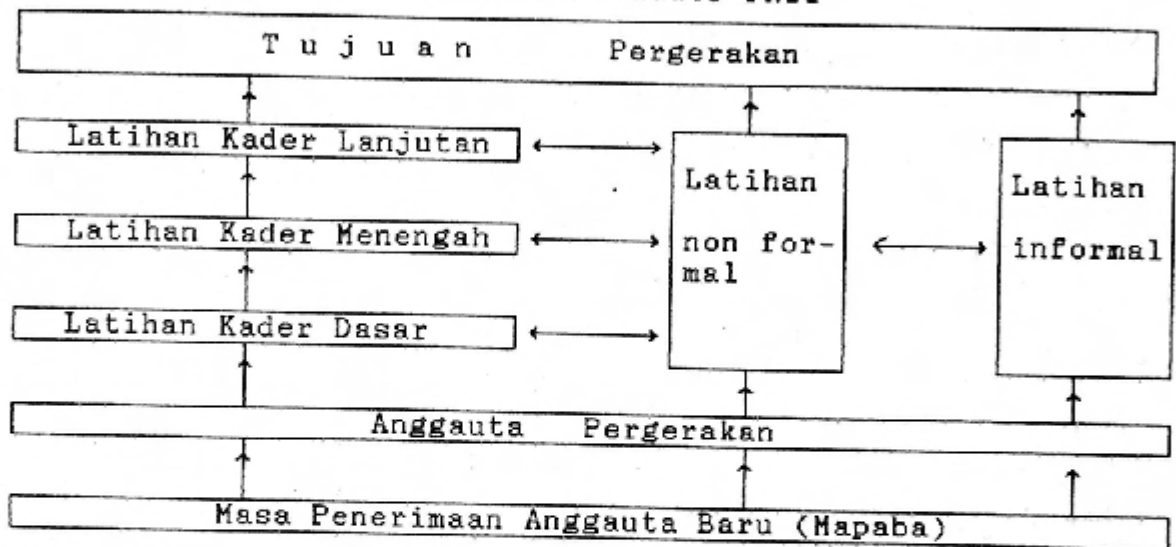
Menengah (LKM) dan Latihan Kader Lanjutan (LKL).

b. Latihan non formal, ialah latihan kejuruan bagi anggota.

c. Latihan informal, ialah latihan praktek bagi para anggota.

Lebih jelasnya, lihat diagram 8 dibawah.

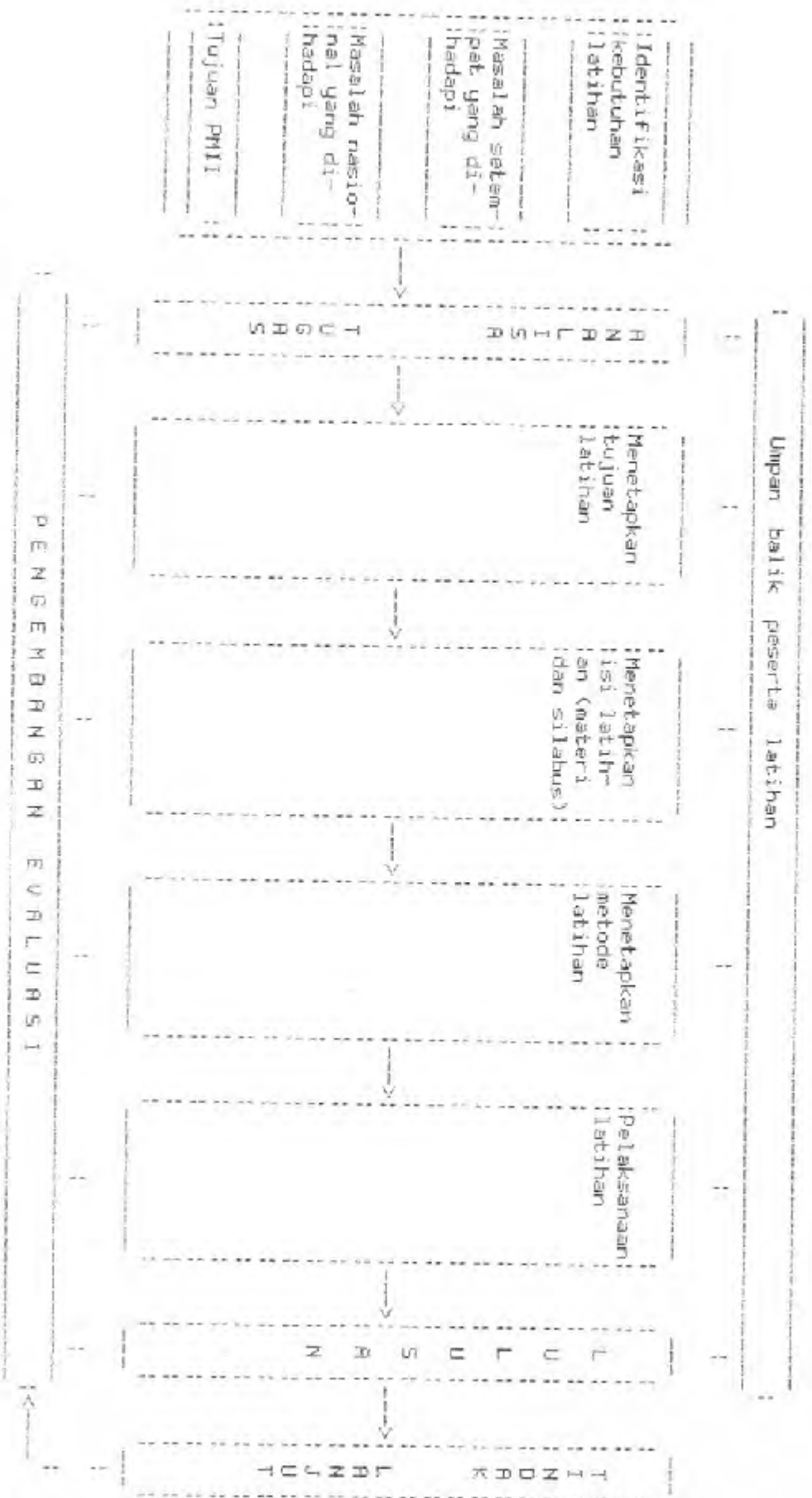
Diagram 8. Sistem Pendidikan Kader PMII



Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kader PMII, (diperbanyak oleh Panitia Latihan Kader Menengah/LKM-PMII, cabang Surabaya, 1985), hal.8. Mapaba dilakukan melalui upacara penerimaan anggota baru.

Yang dimaksud dengan latihan disini, yaitu suatu upaya sadar dan sistematis dalam pengembangan potensi peserta yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan tugas secara tepat dan cepat. Pendekatan sistem latihan itu, tergambar dalam diagram 9 dibawah.

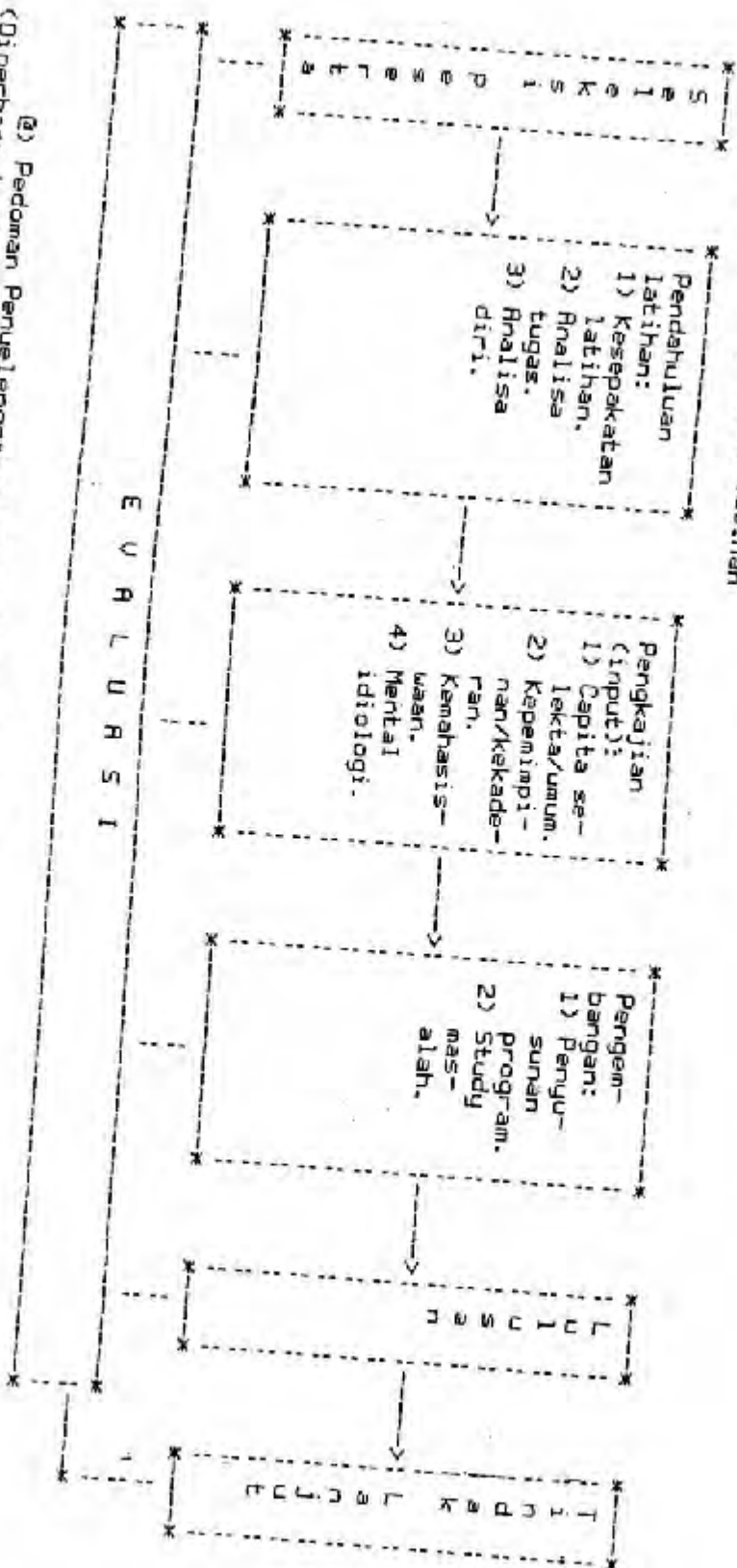
Diagram 9. Pendekatan Sistem Latihan Kader PMII



*Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kader PMII, (diperbanyak oleh Panitia Latihan Kader Menengah/LKM-PMII, cabang Surabaya, 1985), p.10

Sedangkan proses pelaksanaan latihan tercermin dalam diagram no.10.

Diagram 10. Proses Pelaksanaan Latihan Kader PMI @
Umpan balik para peserta latihan



(2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kader PMI;
(Diperbanyak oleh Panitia Latihan Kader Menengah/LKM-PMI,
cabang Surabaya, 1985), p.14.

LKD ialah latihan formal tingkat pertama dengan penekanan pada penanaman mental idiologi, sikap kepemimpinan, dan motivasi pengembangan diri. LKD menghasilkan kader muda. Materi latihan terdiri dari:

- a. Bidang idiologi, yang mencakup beberapa bidang study: Ke-Islaman, Ahlussunnah wal Jama'ah, Ke-PMII-an, dan Pancasila.
- b. Bidang ke-mahasiswa-an, yang mencakup bidang study: Universitaria, serta Hakekat dan Peranan Mahasiswa.
- c. Bidang kepemimpinan dan kaderisasi, mencakup bidang study: Kepemimpinan, Keorganisasian, Management, Scientific Problem Solving, Usulan proyek/programming, Sekretariat, Persidangan, Retorika, Protokol, dan Metode diskusi.
- d. bidang umum/capita selekta, yang mencakup: Politik, dan Ceramah Umum.³⁵²

LKM ialah latihan kader tingkat kedua dengan penekanan pada pengembangan mental idiologi, pengetahuan tentang sikap-sikap kepemimpinan, dan kemampuan praktek mengelola program organisasi. Materi latihan, melanjutkan materi LKD ditambah beberapa bidang study yakni: nilai dasar perjuangan, komunikasi, publik relation/human relation, dasar perencanaan, evaluasi, strategi dan taktik, dan study pembangunan.³⁵³

LKL ialah latihan tingkat terakhir dengan penekanan pada kemampuan berpikir analitis, membuat konsep teoritis, membuat rencana operasional, dan yang terpenting pelaksanaan secara organisatoris. Materi latihan, melanjutkan materi LKM, ditambah bidang study: fungsi dan hakekat mahasiswa, serta psikologi sosial.³⁵⁴

Adapun latihan non formal ialah bentuk latihan kejuruan bagi anggota, untuk memperdalam dan mengembangkan bidang tertentu. Dengan latihan non formal diharapkan: tumbuhnya bakat dan keahlian anggota yang dapat disalurkan melalui organisasi; tumbuhnya rangsangan dikalangan anggota untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan bakatnya; terwujudnya kelancaran mekanisme organisasi dengan adanya tenaga yang cakap, terampil, sesuai dengan bakat dan keahlian.

annya. Sedangkan bidang-bidang latihan non formal antara lain: latihan pelatih, administrasi dan kesekretariatan, management, pers/jurnalistik, study ke-islaman, bahasa, da'wah, metode diskusi, keputrian, dan kesenian.³⁵⁵

Sedangkan latihan informal ialah latihan praktek bagi anggota untuk mengamalkan pengetahuannya yang diperoleh melalui latihan formal dan non formal. Latihan informal pada dasarnya bersifat personal yang ditentukan oleh pribadi anggota, dengan bentuk kegiatan antara lain: kepanitiaan, diskusi, lokakarya, seminar, delegasi, dan berbagai bentuk praktek berorganisasi.³⁵⁶

8. Peranan Wanita dalam Pembangunan

Pembangunan yang menyeluruh, mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal disegala bidang. Peranserta NU dalam pembangunan bidang ini, dapat dilihat pada terbentuknya beberapa organisasi Otonom, yakni Muslimat NU, Fatayat NU, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Muslimat NU untuk para ibu-ibu, Fatayat NU untuk para pemudi, dan IPPNU untuk para pelajar putri.

Untuk melihat peranan wanita NU dalam pembangunan, marilah kita ikuti kegiatan sebuah pesantren putri di kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

Pondok pesantren putri Salafiah telah didirikan pada 1956, oleh kiyai Abd. Rohim Rohani di Kauman, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pada mulanya, hanya ada 17 santriwati, 9 tinggal di pesantren dan lainnya pulang pergi. Pesantren berkembang dan terus disempurnakan. Pada 1985, jumlah santriwati meningkat menjadi 900. Sebuah madrasah diniyah didirikan pada 1961, dan pada 1973 didirikan juga madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Pada 1977, pimpinan pesantren meninggal dunia dan digantikan oleh menantunya Ustadz Choiron Husen.³⁵⁷

Kegiatan santriwati, selain belajar di madrasah, juga memperdalam ilmu pengetahuan extra kurikuler. Ada 29 mata pelajaran extra kurikuler yang dikursuskan secara sistematis

pada pagi, siang, dan malam hari. Mata pelajaran itu antara lain: cara berpidato, puitisasi Al-Qur'an, jurnalistik, dan sebagainya. Khusus mengenai kursus jurnalistik, hingga 1985 telah mencapai angkatan yang ke 3. Dan sebagai hasil kegiatan ini, telah diterbitkan sebuah bulletin bulanan bernama "El-Wardah". Hingga 1985, telah terbit 22 nomor dan memasuki tahun penerbitan ke-2. Melalui El-Wardah, para santriwati yang berbakat menulis dapat mencurahkan buah pikirannya, dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. El-Wardah yang oplahnya 450 per bulan itu, merupakan media informasi dikalangan warga pesantren dan para alumni.³⁵⁸

Disamping itu, setiap hari jum'at pagi, santriwati mengisi santapan rohani di radio RDA 45 Bangil, kabupaten Pasuruan. Untuk acara ini, diatur secara bergantian. Kegiatan lain, yang tidak kalah dengan kaum laki-laki, adalah bathsul masail. Kesimpulan hukum yang dihasilkan, dimuat di El-Wardah sehingga dapat diketahui oleh seluruh warga pesantren.³⁵⁹

Untuk melihat kemampuan santriwati, pada tiap akhir tahun diadakan lomba baca kitab gundul (kitab kuning dalam cetakan tanpa harokat), lengkap dengan i'robnya (cara baca kitab kuning di pesantren salaf). Kitab-kitab yang dilombakan itu antara lain Akhlaqul Banat, Fathul Qorib, dan Fathul Mu'in. Disini para santri dilihat kemampuannya, sambil disaksikan oleh segenap tamu yang diundang. Setelah diumumkan pemenangnya, lomba pun berakhir. Alumni pesantren ini, setelah pulang ke kampung halaman, banyak yang menjadi guru, muballighat (juru dakwah wanita), dan ada pula yang menjadi pembina pesantren.³⁶⁰

3. Politik, Aparatur Pemerintahan, Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri

c. Politik, Aparatur Pemerintahan, Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri

Peranserta NU dalam pembangunan bidang ini, meliputi

beberapa sub bidang antara penerangan dan media massa. aparaturnya pemerintah dan hubungan di tingkat memberikan saran-saran.

1. Politik

Dalam Program Dasar P tidak disebutkan bidang politik organisatoris NU tidak mempunyai yang mencapai puluhan juta ini. Tujuan untuk menyalurkan aspirasi politiknya lewat kekuatan politik yang ada yakni Golkar, PPP atau PDI.

Hubungan antara NU dan politik dinyatakan resmi sebagai berikut:

Hak berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota Nahdlatul Ulama.

Tetapi Nahdlatul Ulama bukan merupakan wadah bagi kegiatan politik praktis.

Penggunaan hak berpolitik dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang ada dan dilaksanakan dengan ahlakul karimah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tercipta kebudayaan politik yang sehat.

Nahdlatul Ulama menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Demikianlah kebijaksanaan NU, sehingga pada Pemilu 1987, secara formal NU tidak mendukung kontestan peserta Pemilu manapun. Warga NU bertebaran, ada yang mendukung Golkar atau PPP, bahkan ada yang pro PDI.

2. Hukum

Peranserta NU dalam pembangunan hukum, terutama tampak dalam program Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pada mulanya ide kompilasi ini, muncul dari Mahkamah Agung (MA). Dan dalam mewujudkan ide tersebut, MA bekerja sama dengan Departemen Agama. Agar lebih jelas, baiklah diikuti terlebih dahulu uraian Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Prof. Bustanul Arifin, SH.,

yang disampaikan pada awal 1985, sebagai berikut:

Ide kompilasi Hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun MA membina bidang teknis yustisial peradil-an agama. Tugas pembinaan ini berdasar pada undang-undang no.14 tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan personil, keuangan, dan organisasi pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan pada Departemen masing-masing. Sedang pengaturan teknis yustisial ditangani oleh MA. Meskipun Undang-Undang tersebut telah ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradil-an agama baru bisa dilakukan pada 1982, setelah ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh ketua MA dan Menteri Agama. SKB itu merupakan jalan pintas tanpa menunggu lahirnya Undang-Undang Pelaksanaan dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 diatas.

Selama dua setengah tahun terakhir, terhitung hingga 1985, MA mendapati beberapa hal di Departemen Agama yang perlu dibenahi:

Pertama, perbaikan sarana pengadilan, termasuk didalamnya personil hakim. Para hakim peradil-an agama perlu meningkatkan kesadaran mereka sebagai hakim. Sebab selama ini, mereka dibina sebagai karyawan biasa hingga kurang menyadari bahwa mereka adalah hakim dalam arti sebenarnya.

MA ingin menyamakan martabat peradil-an agama dengan peradilan umum. Langkah-langkah yang telah diusahakan antara lain:

- a. Direktorat Peradilan Agama di Departemen Agama sedang diusahakan meningkat menjadi Direktorat Jendral, sebagaimana posisi kelembagaan peradilan umum di struktur organisasi Departemen masing-masing.
- b. Seleksi hakim peradil-an agama dilakukan bersama-sama oleh Departemen Agama dan MA dengan menerapkan teknik seleksi hakim umum.
- c. Setiap tahun MA mengadakan pembinaan hakim-hakim peradil-an agama.
- d. Disamakannya tunjangan jabatan hakim agama dan hakim umum.

Kedua, hukum yang diterapkan dalam hal ini tentu saja hukum Islam. Ada beberapa hal yang dirasakan sebagai hambatan. Hukum Islam (fiqh) tersebar dalam sejumlah besar kitab susunan para fuqoha diabad-abad yang lampau. Bisa dikatakan bahwa dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih dari satu pendapat.....

Pada 1953, Departemen Agama menetapkan 13 buah kitab fiqh sebagai pegangan peradil-an agama yakni: Al-bajuri, Fathul Mu'in dengan syarahnya, Syarqowi 'alat Tahrir, Qulyubi/Mahalli, Fathul Wahab dengan syarahnya, Tuhfah,

Targhibul Musytaq, Qawaninusy syari'iyah Lissayyid
 Usman ibn yahya, Qawaninusy syari'iyah Lissayyid
 shodaqoh Dli'an, Syamsuri fil faraidl, Bughyatul
 Mustarsyidin, Al Figh 'alal Madzahibil Arba'ah, dan
 Mughnil Muhtaj.

Tampaknya, karena belum memadai seringkali dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara. Ternyata dengan langkah inipun, kepastian hukum masih merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi.

Putusan peradilan agama berdasarkan kitab-kitab figh ini, membuka peluang terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab yang tidak menguntungkannya itu, seraya menunjuk kitab yang menawarkan penyelesaian berbeda. Bahkan diantara 13 kitab itu, ada yang telah jarang menjadi rujukan. Dan sering pula terjadi para hakim berselisih tentang pemilihan kitab rujukan.

Sesuai dengan pengertian kompilasi itu sendiri, maka yang ditempuh hanyalah mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah figh yang selama ini dianut oleh ummat Islam Indonesia. Jadi bukan kodifikasi, sebab istilah ini mengandung pengertian menciptakan hukum baru atau merubah yang telah ada. Jika secara sederhana syari'ah ataupun figh dibagi menjadi bidang ibadah dan mu'amalah, maka yang dikompilasikan adalah bidang mu'amalah.

Hasil kompilasi itu, akan dijadikan tiga kitab yakni kitab perkawinan; kitab waris; dan kitab waqaf, shodaqoh dan sebagainya.

Sebagaimana yang telah bisa diduga, kompilasi hukum Islam diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum di pengadilan agama. Sebab menurut doktrin hukum nasional Indonesia, hukum bisa berlaku dalam arti bisa dipaksakan jika ditunjang oleh tiga pilar: aparat hukum, peraturan hukum yang jelas, dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Aparat hukum Islam telah ada, yaitu peradilan agama. Sedangkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat, adalah tugas para ulama untuk membinanya. Adapun pilar kedua belum memadai meskipun hukum Islam sudah menjadi hukum materiil di peradilah agama. Untuk itu, tinggal kompilasi yang diperlukan.

Program kompilasi hukum Islam ini, melewati empat jalur:

Jalur pertama, adalah pembahasan kitab-kitab figh, minimal 13 kitab standar tersebut. Bisa juga ditambah dengan kitab-kitab lain, bahkan mungkin madzhab-madzhab lain. Semua itu diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan para ulama. Panitia juga meminta bantuan beberapa IAIN, dalam jangka waktu tertentu, untuk mengungkap pendapat-pendapat yang termuat di dalam kitab-kitab mengenai

masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan menyertakan hujjah-hujjahnya.

Jalur kedua, mewawancarai para alim ulama tentang masalah-masalah tersebut. Panitia pusat telah sepakat memakai dua cara yakni:

- a. Mempertemukan mereka untuk diwawancarai secara bersama-sama.
- b. Mewawancarai mereka secara terpisah, jika cara pertama tidak mungkin dilaksanakan. Dari wawancara itu, diharapkan memperoleh saran-saran tentang pemakaian kitab dan madzhab rujukan.

Jalur ketiga, membuka kembali yurispudensi yang telah berlaku. Putusan-putusan peradilan agama yang telah dijatuhkan selama ini, dikaji dan dipilih mana yang diperlukan dan dapat diterapkan.

Jalur keempat, mengadakan study perbandingan. Kita pelajari bagaimana negara-negara lain memberlakukan hukum Islam, yakni bidang-bidang yang akan dikompilasikan di Indonesia.

Setelah itu diadakan lokakarya-lokakarya yang diikuti oleh para ahli hukum Islam dan ahli hukum umum. Pada tahap ini diusahakan tercapainya ijma' (konsensus) di antara mereka dalam suasana bebas dan ilmiah.

Selanjutnya menjadi Rencana Undang Undang Pengadilan Agama. Dan untuk menjadi Undang-Undang, diperlukan persetujuan DPR.

Dalam rangka kompilasi tersebut, pada akhir february 1985, NU mengeluarkan artikel resmi sebagai sumbangan pemikiran. Artikel itu diberi judul "Sekelumit Pandangan Mengenai Prinsip Pengamalan Ajaran Islam", sebanyak tiga lembar folio.

Sebagian isi artikel yang terdiri dari sembilan alinea itu, adalah sebagai berikut:

Dalam mempelajari hukum Islam diperlukan pendekatan ta'abbud baru kemudian taaqul sehingga kemurnian serta kelestarian ajarannya tetap terjaga. Ikhtiar menetapkan hukum harus menggunakan dasar, sistem, dan metoda yang benar, mengetahui hikmah tasyri', mengerti motivasinya, cukup persyaratan ilmiahnya, dan berusaha menjaga kemurnian serta kelestarian agama Islam. Dan usaha itu, didukung jiwa ta'abbud serta taqwa.

Pembangunan hukum Nasional, yang antara lain dengan

mengadakan kompilasi hukum Islam, dalam kerangka pembangunan Nasional yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 sesungguhnya mempunyai tujuan terwujudnya hukum yang diterima oleh masyarakat, memenuhi rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama bahkan memberikan dorongan hidup suburnya agama.

Oleh karena itu kompilasi hukum Islam, dalam rangka pembangunan hukum Nasional, mempunyai pengertian mengangkat hukum Islam yang hidup berkembang dan diamalkan dalam praktek berbangsa dan bernegara selama ini. Hukum Islam itu, tersebar dalam berbagai kitab.

Berabad-abad lamanya ajaran Syafii telah diterima bangsa Indonesia. Maka kompilasi dimaksudkan mengangkat kompilasi Syafiiyah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kompilasi Syafiiyah itu, dengan didasarkan pada kitab-kitab Syafiiyah, menjadi kompilasi hukum Islam yang berbahasa Indonesia sehingga memudahkan para penyelenggara negara khususnya para penegak hukum dan para pencari keadilan. Kompilasi yang demikian ini memenuhi rasa keadilan, rasa keagamaan dan dapat diterima masyarakat, juga sejalan dengan pembangunan Nasional yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.³⁶³

Disamping itu, pada akhir Desember 1985, NU menyelenggarakan bathsul masail di pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. "Bathsul masail kali ini mempunyai sifat khusus," demikian kata K.H. Najib Abdul Wahab pimpinan pesantren tempat pertemuan yang dihadiri Menteri Agama. "Sifat khusus itu," dia melanjutkan, "karena tidak seperti lazimnya membahas soal-soal dari bawah yang ditampung dari cabang-cabang yang ada. Melainkan dari Tim Proyek Kompilasi Hukum Islam, sebuah kerjasama MA dengan Departemen Agama". Tim proyek ini, telah menyebarkan 200 kuesioner yang sama pada para ulama di 10 kota di Indonesia. Sebagian dari kuesioner ini, telah menyibukkan para ulama NU dalam pertemuan di Jombang itu.³⁶⁴

Menurut Direktur Peradilan Agama Departemen Agama H. Muchtar Zarkasyi SH., bahwa yang terlibat dalam pembahasan persoalan tersebut, tidak hanya NU. Tapi juga melibatkan Muhammadiyah, Persis, Washliyah, dan lain sebagainya. Dan tentunya Ulama-Ulama dari berbagai organisasi itu, telah menerima kuesioner dimaksud. Setiap kuesioner yang dikirimkan memuat 102 pertanyaan pokok, berisi soal-soal

hukum yakni: nikah, talak, rujuk, adopsi, pendidikan anak, persusuan, waris, wasiat, hibbah, wakaf, dan lain-lain. Menurut K.H. Najib Abdul Wahab, Rais Syuriah NU Jawa Timur, bila dirinci lagi bisa menjadi 300 soal. Bila kuesioner sudah dijawab, bukan berarti persoalan sudah rampung. Hambatan pertama: kemungkinan bahwa kesimpulan hukum dari sekumpulan ulama berbeda dengan kelompok yang lain. Hambatan kedua: kemungkinan sebagian hukum yang telah disepakati itu akan berbeda dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Perkawinan.³⁶⁵

Tujuan proyek kompilasi ini, dijelaskan oleh Bustanul Arifin yang juga hadir dalam pertemuan di pesantren itu: "Proyek ini bertujuan membuat patokan-patokan hukum Islam untuk digunakan di Indonesia. Kitab itu nantinya bisa dipakai oleh hakim agama untuk menetapkan hukum. Bisa dipakai masyarakat untuk pedoman hidup. Bahkan pengadilan umumpun akan memakainya, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang digarap dengan hukum Islam".³⁶⁶

Menengok ke pengadilan agama, yang sejak 1983 digandengkan ke MA yakni dengan jalur kasasi pengadilan agama ke MA, masih saja ada masalah yang sulit diselesaikan oleh hakim agama walaupun sudah memiliki 13 kitab rujukan yang hampir semuanya dari madzhab Syafii. Bahkan pada 1986 ditambah lagi beberapa rujukan antara lain: Zadul Ma'ad karya Ibnul Qoyyim pengikut hambali, Bidayatul Mujtahid tulisan filosof Ibnu Rusydi tentang Madzhab empat, dan Figh Sunnah karya Sayyid Sabiq. Kesulitan hakim agama dalam menyelesaikan perkara itu, mungkin disebabkan tidak satupun kitab-kitab tersebut ditulis dengan memperhatikan keperluan masyarakat Indonesia. Disamping itu, mengambil sebuah kitab bisa mengakibatkan hukum yang berbeda bila dibanding dengan pengambilan kitab lain. Ditambah dengan kemungkinan masuknya masalah baru, tak heran bila penafsiran bisa begitu berlain-lainan. Kesulitan-kesulitan inilah yang dikumpulkan menjadi kuesioner.³⁶⁷

Selanjutnya, dalam bathsul masail yang dihadiri 40

ulama itu, Menteri Agama dalam pengarahannya mengatakan:

.....
Dikatakan, saya menginginkan peninjauan kembali hukum waris, yang disebutkan dalam Al-Qur'an "Lidzdzakari mitslu hadz-dzil untsayain" itu.

Nah, karena itu saya perlukan datang kemari, inilah kesempatan untuk menjelaskan pikiran saya kepada bapak-bapak.

Bapak-bapak sekalian, saya berbicara ini tidak menggurui. Tapi inilah pendapat saya. Dan barangkali ada manfaatnya saya sampaikan menjelang bahtsul masail ini.

Diantara fiqoha dari 4 madzhab itu, terdapat kelompok-kelompok yang membagi hukum Islam menjadi dua: ibadah dan mu'amalah ad dunyawiyah. Dari kelompok Syafii yang terkenal dengan pembagiannya itu adalah Ibnu Abussalam dalam bukunya "Qowaidul Ahkam". Dari kelompok Maliki adalah Asy-Syatibi, sedangkan dari kelompok Hambali adalah Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah.

Kalau urusan ibadah itu jelas tak boleh diubah dan ditambah. Sebab, jika itu terjadi berarti bid'ah dan "kullu bid'atin dhalalah". Tapi, dalam soal muamalah dunyawiyah, menurut Ibnu Abdussalam dan Ibnu Qoyyim, perbedaan dan perubahan fatwa itu titik beratnya dikembalikan pada kepentingan masyarakat, juga karena perbedaan waktu, tempat, situasi, kondisi, tujuan dan adat.

Barang siapa berhukum selain hukum Allah itu kafir. Baik tetapi mari kita menengok tarikhut tasyri' di zaman sahabat Umar Ibnu Khattab.

.....
Tapi apa yang terjadi dalam pemerintahan Umar ? Selama Umar memerintah, ternyata telah banyak mengambil keputusan hukum yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an. Tindakan itu diantaranya, adalah menghapus suatu kelompok yang berhak menerima zakat, "Al muallfatu qulubuhum" ternyata dihapus oleh Umar. Bukan karena apa? Tetapi karena situasi sudah berubah.

Juga dalam soal pembagian ghonimah. Dalam surat Al-Anfal, pembagian ghonimah itu sudah jelas. Tapi di zaman Umar justru lain. Tidak lagi dibagikan menurut bunyi surat Al-Anfal itu. Terutama barang yang tidak bergerak tetap diserahkan pada pemiliknya. Dan pemilik barang itu cuma dikenakan pajak guna biaya negara termasuk tunjangan bagi mereka yang mengikuti perang. Jadi Umar sendiri sudah bergeser dari nash Al-Qur'an.

.....
Saya tidak minta kita sekalian ini mengubah hukum waris itu. Tapi kita harus ingat, bahwa hukum itu berputar sesuai dengan kausalitasnya. Jika alasan diundangkannya suatu hukum telah hilang, gugur pulalah hukum itu. Dan jangan lupa, adat itupun merupakan sendi hukum.

Banyak orang meminta fatwa waris ke pengadilan agama. Tapi, setelah diberi fatwa yang sesuai dengan faroid itu, mereka justru lari ke pengadilan negeri karena merasa tidak puas dengan fatwa itu. Ini fakta. Dan banyak terjadi di Indonesia.³⁰⁸

Pidato pengarahan menteri agama itu kurang mendapatkan tempat di hati pendengarnya. Para Ulama hampir cuci tangan dari persoalan kompilasi hukum Islam itu. "Jika tak ada pak Bustanul, mungkin persoalannya sudah lain. Bisa jadi beliau-beliau itu tak bakalan mau berepot-repot membahas masail dari MA itu," kata A. Ghaffar Rahman SH. Karena pendekatan Bustanul Arifin itulah, para kiyai sepakat untuk membahas masail itu sampai tuntas.²⁰⁹

Tim Proyek kompilasi Hukum Islam yang dipimpin Bustanul Arifin itu, pada akhir 1987, telah merampungkan Rancangan Kompilasi Hukum Islam. Dalam melaksanakan tugasnya, Bustanul Arifin yang juga menjabat sekjen Perhimpunan Ahli Hukum Islam Asia Tenggara itu, dibantu Prof. Chalid, Masrani Basram, Amiruddin Nur, dan Muchtar Zarkasi. Dan untuk kesempurnaan hasil tadi, pada 2-6 Pebruari 1988, dilokakaryakan lagi di hotel Kartika Candra, Jakarta. Lokakarya yang dibuka oleh ketua MA Ali Said itu, pesertanya 127 orang yang terdiri dari: 13 guru besar, 46 kiyai, 21 sarjana hukum, hakim agung, hakim tinggi, para fuqoha, dan beberapa rektor IAIN.³⁷⁰

Menurut Menteri Agama, lokakarya itu bisa disebut sebagai Ijmak atau kesepakatan Ulama Indonesia. "Apapun hasilnya, ini adalah kesepakatan bersama dari kita," katanya. Mereka telah mengulangi tradisi Islam yang telah melenbaga, yakni ijmak sebagai salah satu sumber hukum Islam setelah Qur'an, Hadits, Qiyas. Rancangan yang memuat 262 pasal itu, hampir tak terlewatkan dibahas semua dari berbagai sudut madzhab. Rancangan tersebut, terdiri dari Buku Satu 19 bab, Buku Dua 9 bab, dan Buku Tiga 5 bab. Selanjutnya tim proyek kompilasi, yang memperoleh dana Rp.286.530.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari presiden Suharto itu,

tinggal merumuskan hasil kompilasi kedalam bahasa Hukum Nasional.³⁷¹

Dalam rangka kompilasi itu, tim juga meresome 42 kitab fiqh rujukan. Kitab-kitab itu dibagi ke beberapa IAIN, yakni: IAIN Ar-Raniri Banda Aceh meresome kitab Fathul Mu'in, Al-Bajuri, dan syarah Syarqowi; IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta meresome Al-Mahalli, Al-Wajir, Fighus Sunnah dan Al-fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah; IAIN Banjarmasin meringkaskan isi kitab Al-Umm dan Bidayatul Mujtahid; sedangkan IAIN Sunan Ampel menyimpulkan Kasf al-ghina, Al-mughni, dan Zad al-ma'ad. Data dan informasi, juga dikumpulkan oleh tim kompilasi lewat study perbandingan di negara-negara yang melaksanakan hukum Islam. Tiga negara yang ditunjuk presiden Suharto yakni Turki, Mesir, dan Tunisia. Dan dari Sudan, diperoleh pengalaman kegagalan, karena diterapkan tergesa-gesa.³⁷²

Hasil kompilasi itu, setelah dirumuskan kedalam bahasa hukum nasional, menjadi Rencana Undang-Undang Pengadilan Agama (RUU-PA) dan tinggal mengajukannya ke DPR. Bila RUU-PA diterima oleh DPR, menurut Menteri Agama, "Kita akan punya peradilan yang mandiri. Jika sudah ada, kita tak perlu kiat untuk eksekusi," katanya. Selama ini putusan PA tak bisa dieksekusi langsung oleh PA sendiri, tapi harus melalui peradilan umum. Keputusan PA seakan tak mempunyai kekuatan hukum, sebelum dieksekusi oleh peradilan umum. Tetapi bila UU itu sudah terwujud, maka Departemen Agama yang berwenang mengangkat hakim dan aparat di PA; dan tentu perlu dipersiapkan aparat eksekusinya. "Ini kerja berat, karena untuk mengangkat hakim saja, Departemen Agama sudah kewalahan," kata menteri agama Munawir Syadzali, MA.³⁷³

Menurut Munawir, pada 1988, diperlukan 1300 hakim agama. Namun, Departemen Agama baru bisa menerima dalam setahunnya rata-rata 100 hakim. Jadi untuk mendapatkan tenaga dalam jumlah tadi, diperlukan waktu hingga 13 tahun. Demikian ini bisa terjadi, karena banyak yang tak memenuhi syarat. Apalagi dalam ujian, banyak diantara calon itu belum mampu membaca kitab kuning. "Hakim perlu membaca

kitab-kitab kuning, supaya putusan

Selanjutnya Menteri Agama selain Islam, seandainya RUU-PA menerima dengan lapang dada dan merupakan kehendak sejarah dan kepentingan agama lain yakni sel

Pada bulan Januari 1989, nampaknya mendapatkan tanggapan RUU-PA itu. "Kami tak lagi mer itu," kata Sukardi Efendi, ketua tim pembahasan RUU-PA dari F-PP. Begitu juga F-PDI menanggapi dengan positif. "Semua kekuatan organisasi politik mendukung kepemimpinan Soeharto. Berarti RUU-PA produk dari kepemimpinan nasional tersebut, harus pula didukung, juga oleh PDI," ujar Djupri, ketua tim yang dibentuk PDI untuk RUU-PA. Yang nampaknya sibuk setor pendapat adalah ditubuh F-KP. Kecuali ada perbedaan pendapat yang cukup tajam, ada masalah yang sempat diramalkan, yaitu beredarnya makalah intern yang seolah menuding RUU itu sebagai pelaksanaan "Piagam Jakarta". Tapi beda pendapat ini sudah diselesaikan secara intern, dan konon makalah itu dianggap tak pernah ada. Dan selanjutnya F-KP tak lagi mempersoalkan eksistensi RUU itu.³⁷⁶

3. Penerangan dan Media massa

Dalam rangka pembangunan sub bidang penerangan dan media massa, NU membentuk Lembaga Ta'lif wan Nasyr yang berfungsi memberikan penerangan lewat penerbitan atau media massa. Dalam pelaksanaan program Lembaga itu, PBNU menugaskan kepada K.H. Sahal Mahfudz, H. Hasjim Latief, dan Drs.M. Ichwan.³⁷⁷

Di Jakarta, warga NU mendirikan Lembaga "Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat" (P3M). Lembaga ini menerbitkan sebuah majalah bulanan "Pesantren" yang dipimpin oleh K.H. Sahal Mahfudz. Sedangkan dewan redaksinya terdiri dari: Abdurrahman Wahid, Abdullah Syarwani, Adi Sasono, M. Dawam Raharjo, Djohan Efendi, Said Budairi,

Soetjipto Wirosarjono, Zamakhsyari Dhofier, Musfihin Dahlan, dan Moeslim Abdurrahman. Pada 1988 majalah ini sudah mencapai volume ke 5 atau tahun penerbitan ke-5. Penerbitan ini, memperoleh rekomendasi Departemen Agama dengan nomor: D.III/5/BA.01/4876/84 ISSN 0126 - 7778. Sedangkan alamat redaksinya di Jln. Cililitan Kecil III No.12 Kalibata, Kramat Jati, Jakarta 13640.⁹⁷⁸

Di Jawa Timur, PWNU juga menerbitkan sebuah majalah bulanan "AULA", berdasarkan SK PWNU Jawa Timur yang bernomor: 183/PW/Kpts/XII/78, dengan tanggal 9 Desember 1987. Dan juga berdasarkan SK Menteri Penerangan yang bernomor: 1190/SK/DITJEN PPG/STT/1987, dengan tanggal 21 Desember 1987. Pemimpin umum dan penanggung jawabnya H. Anas Thohir (non aktif). Sedangkan staf redaksinya terdiri dari: Ahmad Hasyim Muzadi, Abdul Wahid Asa, Choirul Anam, M. Saleh Hayat, Ghozi Dz, Murtadji Djunaidi, Solihin Hidayat, dan Masduki Baidlowi. Pada 1989, majalah ini sudah mencapai tahun penerbitan yang ke XI. Alamat redaksi dan tata usahanya di Jln. Raya Darmo 96, Surabaya.⁹⁷⁹

Dan masih banyak lagi beberapa majalah lokal, brosur, dan bentuk-bentuk penerbitan lainnya yang tersebar di berbagai propinsi di Indonesia. Misalnya: buletin bulanan "EL-Wardah" yang diterbitkan oleh pesantren putri Salafiyah di Bangil, Pasuruan; majalah bulanan "Tebu Ireng" yang diterbitkan oleh pesantren Tebu Ireng, Cukir, Jombang; dan brosur yang ditulis K.H. Ahmad Shiddiq dengan judul "Gerak Serentak Ulama, Zuama dan Umara".

Disamping itu, NU juga membentuk Lembaga Da'wah yang salah satu diantara beberapa fungsinya adalah: mengkoordinir juru Da'wah NU yang memberikan penerangan agama pada masyarakat. Untuk pelaksanaan program Lembaga ini, PBNU menunjuk K.H. Chamid Wijaya dan Drs.H.Asnawi Latief.⁹⁸⁰

Khutbah jum'at yang dilakukan seminggu sekali di setiap masjid, juga efektif bagi NU. Disamping sebagai ibadah, juga sebagai media penerangan khususnya masalah-masalah agama.

Menurut Departemen Agama, pada 1983, jumlah masjid di

seluruh Indonesia tercatat sebanyak 100.000. Di Jakarta saja tercatat 1500 masjid.³⁴¹ Namun, penulis belum mendapatkan fakta berapa jumlah masjid NU pada tahun tersebut. Dan juga untuk tahun berikutnya 1984-1989, belum dijumpai data masjid NU di seluruh Indonesia.

Film juga dimanfaatkan oleh NU sebagai media da'wah Islam. K.H. Yusuf Hasyim, pada 1985 yang pada saat itu dia menjabat sebagai wakil Rais Syuriah PBNU, tampil sebagai aktor dalam film "Wali Songo". Ia memainkan peran Sunan Gresik yang memberi nasehat pada Syekh Siti Jenar. Sedangkan alasan dia bersedia main film itu, karena film tersebut mempunyai misi da'wah Islam.³⁴² Disamping itu, Yusuf Hasyim mengemukakan:

Saya tampil dalam film itu, untuk berda'wah. sebab dunia film telah banyak diracuni kemaksiatan. Sembilan puluh persen film Indonesia adalah film-film yang bertemakan maksiat. Atau setidaknya tidaknya menampilkan adegan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Film itu ibarat sebuah gelas yang warnanya putih. Gelas itu, bisa diisi dengan minuman apa saja. Kalau diisi dengan air putih bersih, maka gelas itu akan kelihatan putih juga. Tapi kalau gelas itu diisi dengan minuman yang warnanya jelek dan memabukkan, tentu warnanya akan menjadi lain.³⁴³

Selain yang sudah disebutkan terdahulu, dan tidak kalah pentingnya, adalah Pusat Informasi Pesantren (PIP).

Menteri Agama Munawir Syadzali, pada pertengahan April 1985, telah meresmikan PIP di pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang Jawa Timur. Hadir dalam peresmian itu Menteri Penerangan Harmoko, Gubernur Jawa Timur Wahono, dan sejumlah pejabat dari Muspida Jombang. Selain itu ikut menyaksikan pula K.H. As'ad Syamsul Arifin, K.H. Ahmad Shiddiq, seorang wakil dari PB Muhammadiyah, dan para sesepuh Tebu Ireng.³⁴⁴

Peresmian PIP itu ditandai dengan suara beduk bertalu-talu, yang diiringi dengan tepuk tangan dan sorak sorai para santri. K.H. Yusuf Hasyim, pengasuh pesantren Tebu Ireng, dalam sambutannya mengatakan:

PIP Tebu Ireng yang diresmikan oleh Menteri Agama ini, bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Upaya rintisan ke arah itu, telah berlangsung sejak lama.

Pada 1974, melalui kerjasama dengan LP3ES, berhasil mendirikan perpustakaan "A.Wahid Hasyim". Dan pada 1977, Pusat Data Pesantren berhasil didirikan.

Pada 1984, melalui kerjasama dengan P3M, berhasil mendirikan Unit Dokumentasi dan Pelayanan Informasi (UDPI).

Semua itu, hasil kerjasama dengan pihak swasta. Kerja sama dengan Pemerintah kali ini, mudah-mudahan bisa menambah kemajuan.

Perpustakaan "A.Wahid Hasyim", mempunyai koleksi 7 macam surat kabar dan 3 macam majalah, yang didokumentasikan sejak 1975. Di sana juga terdapat dokumentasi 10.000 buku dan kitab, naskah asli tulisan pendiri pesantren, kaset pidato atau ceramah, paper, risalah, dan karya tulis para santri.

Semua ada di perpustakaan itu. Malah jika salah satu penerbit surat kabar, kesulitan mencari arsip korannya, bisa dicari disitu.

Menteri Penerangan, disamping menyerahkan bantuan berupa pesawat TV, dalam pidato pengarahannya mengatakan:

Pada hari ini dan jam yang sama, juga dilakukan secara serentak peresmian PIP di tujuh propinsi, yang dilaksanakan oleh Kakanwil Departemen Penerangan dan Kakanwil Departemen Agama setempat.

Ketujuh PIP yang diresmikan itu adalah: pesantren "Futuhiyah", Meranggen, Jawa Tengah; pesantren "Sunan Pandanaran", Daerah Istimewa Yogyakarta; pesantren "Darussalam", Ciamis, Jawa Barat; pesantren "Rabithah Kediri", Nusa Tenggara Barat; pesantren "Darudda'wah Wal Irsyad", Pare-pare, Sulawesi Selatan; pesantren "Darussalam", Martapura, Kalimantan Selatan; dan pesantren "Diniyah Putri", Padang Panjang, Sumatra barat.

Betapa besar andil para Ulama, juru da'wah atau muballigh dalam mensukseskan pembangunan. Para Ulama, juru da'wah atau muballigh inilah yang tidak henti-hentinya menyeru pada perbuatan ma'fruf dan mencegah kemungkaran. Mereka menjelajahi pelosok-pelosok desa tanpa pamrih, hanya dengan tekad "mencintai tanah air adalah sebagian dari pada iman" (mendengar ucapan ini para santri tertawa). Sehingga, hampir tak ada desa betapapun jauhnya yang tidak disinggahi para Ulama, juru dakwah atau muballigh. Mereka itu dihormati dan bertahta di hati rakyat.

Para Ulama, juru da'wah atau muballigh adalah salah satu pemegang kunci informasi. Mereka adalah pembawa obor penerang yang mengatakan bahwa benar itu benar, dan yang salah itu salah. Karena perbuatan yang terpuji

itu, mereka lantas menjadi panutan masyarakat.

Karena itulah, PIP merupakan kerabat kerja baru bagi Deppen maupun Depag. Ahlan Wasyahlan (hadirin tertawa lagi). Semoga kerja sama berjalan serasi, berdaya guna, dan berhasil guna. Sehingga dapat saling tunjang menunjang, dukung mendukung, saling memberi data, dan saling memberikan motivasi dalam ³⁸⁶menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Secara informal pesantren sejak kelahirannya telah menjadi pusat informasi. Hasrat pemerintah untuk melibatkan pesantren sebagai agen pembangunan diterjemahkan dengan melembagakan PIP di berbagai pesantren. Kekurang mandiri dan ketidak siapan pesantren untuk melembagakan perannya sebagai pusat informasi, mengakibatkan alur informasi yang sepihak. Alur informasi yang ada lebih banyak dari pemerintah. ³⁸⁷

Melihat kenyataan itu K.H. Sahal Mahfudz berkomentar:

Sekarang ini, saya melihat dimana-mana arus informasi itu masih sepihak. Artinya PIP itu merupakan suatu sarana informasi dari pemerintah ke masyarakat pesantren. Demikian itu saya melihat. Padahal, mestinya tidak begitu. Yang benar adalah adanya timbal balik dari kedua belah pihak. Jadi informasi itu, katakanlah untuk diketahui oleh pihak luar maupun pemerintah, kan harus disampaikan pesantren. Lha itu, Rupa-rupanya pesantren-pesantren yang telah menerima PIP belum siap seperti itu. Katakanlah PIP ³⁸⁸sudah menerbitkan majalah, isinya juga tidak informatif.

Kesiapan yang dimiliki pesantren Maslakul Huda dalam melembagakan perannya sebagai pusat informasi, menjadikan diincar oleh pemerintah untuk dijadikan PIP model pemerintah. Dari hasil tawar-menawar antara Kiai Sahal dengan pemerintah setempat, akhirnya diputuskan untuk melembagakan PIP di Maslakul Huda, dengan syarat-syarat tertentu. Dengan kemandirian seperti itu, maka PIP tidak lagi sepihak, tapi timbal balik. ³⁸⁹Pesantren Maslakul Huda ini, terletak di Kajen, Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

D. Pertahanan Keamanan

Peranserta NU dalam pembangunan pertahanan . kemanan, masih berada pada tingkat memberikan rekomendasi atau saran-saran. Hal ini, dapat dilihat pada butir-butir keputusan muktamar NU ke-27 yang antara lain menyebutkan:

NU mempunyai tugas untuk melakukan transformasi sosial secara bertahap, terus-menerus, dan terarah untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi ditengah-tengah masyarakat bangsa. Upaya tersebut, dilaksanakan dengan mengingat tugas NU untuk juga menjaga dan memantapkan integrasi Nasional, baik dalam arti keutuhan teritorial maupun keserasihan hubungan antara semua lapisan-lapisan dan golongan masyarakat.

Kedua tugas tersebut, merupakan dua sisi penting yang ditunaikan NU dengan cara menjaga keseimbangan antara keduanya, sehingga dengan demikian, peningkatan-peningkatan dibidang keadilan dan demokrasi, dapat dicapai dengan senantiasa menjunjung tinggi dasar-dasar yang melandasi kokohnya ikatan persatuan baik dalam kehidupan politik, ekonomi, ³⁰⁰ sosial budaya, keagamaan, maupun pertahanan keamanan.

Dalam rangka menangkai ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan negara dan bangsa, butir yang lain menyebutkan:

Muktamar NU mengingatkan dan menekankan kembali kepada warganya untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sebaik-sebaiknya. Ketaatan seorang muslim pada ajaran agamanya akan melahirkan sikap mental yang menghargai disiplin, baik ditingkat pribadi segenap anggauta, keluarga, maupun masyarakat. Sikap yang menghargai disiplin dalam mengamalkan ajaran agama, akan memberikan dukungan dan saham yang amat besar terhadap peningkatan disiplin Nasional. Sedangkan disiplin Nasional merupakan syarat mutlak bagi kesiapan bangsa untuk menangkai setiap ancaman yang dapat membahayakan negara dan bangsa, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. ³⁰¹

Butir-butir yang lain lagi menyebutkan:

.....
Keikut sertaan NU dalam menumbuhkan dan mengembangkan pola hidup sederhana, sikap kemandirian, kecintaan terhadap kerja keras, dan keinginan untuk mengejar prestasi yang tinggi adalah merupakan sumbangan warga NU

untuk ikut serta membangun masyarakat bangsa yang diwarnai oleh kesyukuran atas nikmat Allah s.w.t., serta memiliki rasa kepekaan dan tenggang rasa terhadap nasib sesama, sambil terus meningkatkan kemampuan dan kualitas kehidupan bersama, dengan penuh kesungguhan dan semangat juang yang tinggi.

Kondisi lingkungan baik budaya maupun alam, kependudukan, serta kemajemukan dalam semua segi kehidupan masyarakat Indonesia, menghajatkan dipupuk dan dimasyarakatkannya segala faktor dasar integrasi nasional seperti idiologi nasional Pancasila, sang saka merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, habasa Nasional, dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan maksud luhur itu, perlu diciptakan suasana keakraban Nasional melalui berbagai kegiatan sosial disemua lapisan masyarakat utamanya dilapisan masyarakat pedesaan. Dalam hubungan itu, kemanunggalan rakyat dengan ABRI perlu diintesifkan, sambil mengupayakan persamaan dan penegasan rumusan kebersamaan ABRI dengan pemimpin-pemimpin masyarakat, dalam kerangka kerjasama dan tanggung jawab ulama dan umara.

Namun dalam saat-saat yang genting seperti saat-saat yang telah lalu, NU mampu tampil dengan sigap untuk mempertahankan Republik ini. Misalnya dalam pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya, dan juga di medan-medan pertempuran lainnya dalam masa Perang Kemerdekaan RI. Juga sangat besar sumbangan NU -terutama Barisan Serba Guna NU- dalam penumpasan pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa heroik yang diperankan NU dimasa lalu; yang kesemuanya itu memerlukan judul-judul tersendiri untuk memaparkan sejarahnya.